LAPORAN HASIL PENELITIAN

PENELITIAN KOMPETITIF INDIVIDUAL KEAGAMAAN

(DERADIKALISASI GERAKAN KEAGAMAAN KONTEMPORER DI INDONESIA)

PEACE EDUCATION

DALAM RANGKA DERADIKALISASI UMAT BERAGAMA

(Studi Kasus di Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) Daerah Istimewa Yogyakarta)

Oleh:

Dr. Imam Machali, S.Pd.I, M.Pd

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA

Nomor : 190/Cp. /Th:

Tanggal : - MAR 2013

KEMENTERIAN AGAMA RI

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA SEMARANG

2012

ABSTRAK

Imam Machali: *Peace Education dalam rangka Deradikalisasi Umat Beragama; Studi Kasus di Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) dalam membangun *peace education* dalam rangka deradikalisasi umat beragama, mengetahui bentuk-bentuk *peace education* yang dilakukan FPUB, dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi FPUB dalam upaya deradikalisasi umat beragama melalui *peace education.*

Penelitian menggunakan metode deskriptif analitik. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memahami dan mendiskripsikan realitas program peace education yang diakukan oleh FPUB dalam rangka usaha deradikalisasi umat beragama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa FPUB dalam usaha mewujudkan persaudaraan sejati antarumat beriman yang dilandasi dengan sikap toleransi-aktif, kejujuran, penghargaan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan *(freedom of religion and belief)* secara garis besar dilaksanakan dalam tiga program kegiatan yaitu; diskusi dan dialog antar umat beragama, aksi solidaritas sosial, dan aksi damai dan do'a bersama. Ketiga hal ini merupakan bentuk dari pendidikan perdamaian *(peace education)* dalam usaha deradikalisasi agama. Bentuk kegiatan FPUB dalam rangka pendidikan perdamaian *(peace education)* mencakup enam aspek yaitu; kedamaian dan anti kekerasan (*peace and non-violence*), hak asasi manusia (*human rights*), demokrasi (*democracy*), toleransi (*tolerance*), pemahaman antar bangsa dan antar budaya (*international and intercultural understanding*), serta pemahaman perbedaan budaya dan bahasa (*cultural and linguistic diversity*). Sedangkan Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka menciptakan perdamaian *(peace education)* dan proses deradikalisasi agama adalah; *pertama* kendala teologis, *kedua*, kendala psikis, *ketiga,* adanya prasangka (*prejudice)*, dan *keempat*, kendala kepentingan *(interest).*

Rekomendasi penelitian ini adalah *pertama,* dialog dan kerjasama yang berintegrasi dengan kegiatan sosial-budaya yang melibatkan berbagai agama dan keyakinan terbukti menjadi sarana efektif dalam membentuk dan mengembangkan persaudaraan sejati sehingga proses deradikalsasi umat beragama berjalan efektif. *Kedua,* dalam konteks DIY keberadaan lembaga atau forum lintasiman yang dibentuk atas prakarsa masyarakat (non-pemerintah) telah berjalan secara efektif, sehingga FKUB—bentukan pemerintah—sesungguhnya sudah dapat terwakili oleh lembaga-lembaga lokal/daerah.

antaranya dilakukan di Semarang, Malang, Brebes, dan Yogyakarta. Penelitian di luar pesantren juga mengkaji resolusi konflik kekerasan agama di Surakarta, seta deradikalisasi dalam Forum Persaudaraan Umat Beragama (FPUB) dan deradikalisasi melalui penguatan ekonomi di Yogyakarta. Selain itu, penelitian juga ditujukan pada teks-teks keagamaan berupa kitab klasik dan tafsir.

Penelitian ini telah menghasilkan temuan-temuan dan rekomendasi yang cukup berharga bagi Kementerian Agama. Oleh karena itu, Balai Litbang Agama menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan selamat kepada para peneliti yang telah berhasil menyusun laporan penelitian ini. Demikian pula penghargaan dan terima kasih Balai Litbang Agama Semarang kepada para pembimbing yang memberi bimbingan pada para peneliti muda ini, yaitu Prof. Dr. Nurdien H. Kristanto, MA. (UNDIP), Prof. Dr. Muslich Shabir, MA. (IAIN Walisongo), dan Dr. Ahmad Rifa'i (UNNES). Guna peningkatan kualitas kegiatan dan penelitian kompetitif pada masa yang akan datang, maka kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami dibutuhkan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Balai Litbang Agama Semarang
Kepala,

Drs. H. Arifuddin Ismail, M.Pd.
NIP. 19571231 198103 1 055

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i
Abstrak ii
Kata Pengantar iii
Executive Summary v
Daftar Isi viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Ruang Lingkup Penelitian 3
1.5 Signifikansi Penelitian 3
1.6 Kajian Pustaka 4
1.7 Kerangka Teori 5
1.8 Metodologi Penelitian 9

BAB II SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FPUB 12
2.1 Sketsa Histors Berdirinya FPUB 12
2.2 Visi dan Misi FPUB 16
2.3 Program-Program Kegiatan FPUB 21
2.4 Pengurus FPUB 23
2.5 Sasaran Kegiatan FPUB 24
2.6 Sumber Dana 24

BAB III *PEACE EDUCATION* DAN DERADIKALISASI UMAT BERAGAMA 27
3.1 Konsep *Peace Education* (Pendidikan Perdamaian) 27
3.2 *Peace Education* dan Pendidikan Multikultural 34
3.3 Urgensi *Peace Education* 36
3.4 *Peace Education* dan Deradikalisasi Umat Beragama 38

BAB IV *PEACE EDUCATION* DAN UPAYA DERADIKALISASI UMAT BERAGAMA FPUB 41
4.1 Peran FPUB dalam Upaya Deradikalisasi Agama 41
4.1.1 Diskusi dan dialog antar umat beragama 42
4.1.2 Aksi Solidaritas Sosial 46
4.1.3 Aksi Damai dan Do'a Bersama 47
4.2 Bentuk-Bentuk *Peace Education* FPUB 50
4.2.1 Kedamaian dan anti kekerasan (*peace and non-violence*) 51
4.2.2 Hak Asasi Manusia (*human rights*) 54
4.2.3 Demokrasi (*Democracy*) 58
4.2.4 Toleransi *(Tolerance)* *60*
4.2.5 Pemahaman antar bangsa dan antar budaya (*international and intercultural understanding*) 61

4.2.6 Pemahaman perbedaan budaya dan bahasa (*cultural and linguistic diversity*) 62
4.3 Kendala *Peace Education* dan Deradikalisasi Umat Beragama 64

BAB V SIMPULAN 66
5.1 Simpulan 66
5.2 Rekomendasi 67

Daftar Pustaka **69**
Lampiran-Lampiran .....
Lembar Pengesahan .....
Biografi Peneliti .....

BAB I

1.1 Latar Belakang

Peran dan fungsi agama dalam beberapa dekade terakhir ini mulai dipertanyakan kembali. Hal ini terkait dengan kasus kekerasan dan konflik atas nama agama yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kasus teror bom buku di awal April 2011, bom Cirebon di pertengahan bulan April 2011, dan fenomena penculikan yang dikaitkan dengan metode *brain washing* atau cuci otak yang diberitakan banyak media berkaitan dengan NII (Negara Islam Indonesia). Kasus-kasus ini semua membawa nama ajaran agama tertentu (islam), seperti syahid, jihad, pemberlakuan syariat Islam, melawan *thâghût* (setan dalam bentuk manusia), dan lain-lain.

Selain itu, data yang dihimpun oleh Wahid Institute pada tahun 2010, menunjukkan dengan jelas bahwa semakin meningkatnya grafik kekerasan yang mengatasnamakan agama, perbedaan keyakinan, dan intoleransi. Wahid Institute mencatat selama 2010 terdapat 63 kasus, dengan rata-rata terjadi 5 kasus perbulan, dan kasus tertinggi terjadi pada bulan Januari (12 kasus), Agustus (8 kasus) dan September (7 kasus). Korban dari berbagai tindakan kekerasan, karena perbedaan agama, keyakinan dan intoleansi ini berjumlah 153 korban, baik individu atau kelompok.

Data tersebut setidaknya menunjukkan bahwa Agama telah memerankan fungsi antagonisnya, di satu sisi agama menjanjikan kebahagiaan, kasih sayang, dan perdamaian *(peace).* Di sisi lain, agama telah menunjukkan wajah "garangnya" yaitu telah berperan sebagai pemicu konflik, permungsuhan, dan kekerasan (radikalisasi) yang mengatasnamakan kebenaran agama dengan dalih "*membela Tuhan*". Disinilah letak persoalan dan sekaligus tantangan agama terkait dengan peran dan fungsinya ditengah-tengah kehidupan manusia. Agama di satu pihak berada di bawah tekanan untuk membuktikan diri sebagai kekuatan yang maju dan bukan mundur, progresif dan bukan reaksioner, humanis bukan primordial, positif dan bukan tandon sentimen dan

kebencian, terbuka dan tidak eksklusif, rendah hati dan bukan penuh klaim. Sedangkan di pihak lain agama juga harus membuktikan relevansinya untuk membantu manusia memecahkan masalah-masalahnya.

Hal penting yang harus dilakukan dalam rangka menciptakan perdamaian, kasih sayang, toleransi, saling pengertian dan kerukunan hidup umat beragama adalah dengan cara membangun komunikasi antar agama yang humanis-dialogis. Komunikasi antar umat beragama ini merupakan media pembelajaran dan pendidikan dalam rangka menciptakan perdamaian *(peace education),* sikap egaliter, keterbukaan dan kejujuran. Jika hal ini telah terbentuk maka secara otomatis deradikalisasi agama telah terbangun.

Peace education adalah sebuah proses menerima dan menghargai perbedaan sebagai bentuk deradikalisasi dalam rangka membangun hubungan antar umat beragama yang terbuka, egaliter dan penuh kedamaian.

Salah satu lembaga focus membangun dan mengembangkan dialog antar agama melalui pendidikan perdamaian *(peace education)* adalah Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) D.I Yogyakarta. Forum ini lahir didasari atas keprihatinan terhadap kondisi masyarakat dan bangsa yang mengalami berbagai konflik, pertikaian, tindak kekerasan, dan radikalisasi atas nama agama. Oleh karena itu, kiprah dan peranannya dalam membangun dialog antar umat beragama dalam rangka deradikalisasi agama—khususnya di daerah Yogyakarta menarik untuk ditelusuri dan dikaji. Sebab lembaga ini memiliki kontribusi besar demi terciptanya hubungan antar umat beragama yang lebih manusiawi, toleran, pluralis-dialogis dan inklusif menuju kehidupan yang penuh perdamaian.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana peran FPUB dalam penyelenggaraan *peace education* dalam rangka deradikalisasi umat beragama?

2. Bagaimana bentuk-bentuk *peace education* yang dilakukan FPUB dalam rangka deradikalisasi umat agama?
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi FPUB dalam upaya deradikalisasi umat beragama melalui *peace education?*

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui peran FPUB dalam penyelenggaraan *peace education* dalam rangka deradikalisasi umat beragama.
2. Mengetahui bentuk-bentuk *peace education* yang dilakukan FPUB dalam rangka deradikalisasi umat beragama.
3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi FPUB dalam upaya deradikalisasi umat beragama melalui *peace education.*

1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian ini adalah peran dan proses pendidikan perdamaian *(peace education)* melalui program-program yang dilaksanakan di Forum Persaudaraan Kaum Beriman (FPUB) Yogyakarta.

1.5 SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai dua signifikansi yaitu secara teoritis dan praktis. Signifikansi teoritis penelitian ini adalah *pertama* peneilitian ini berguna bagi pengkayaan khazanah pemikiran akan pentingnya *peace education* di tengah-tengah kehidupan keberagamaan umat yang plural dan multikultural. *Kedua,* penelitian ini bisa dijadikan sebagai batu pijakan ke depan untuk membangun kehidupan keberagamaan yang damai, penuh penghargaan, toleransi melalui *peace education.*

Signifikansi praktis penelitian ini adalah *pertama,* penelitian ini dapat dijadikan sebagai model pendidikan dalam membangun perdamaian umat *(peace education)* di tempat lain yang plural dan multikultural. *Kedua,* hasil

penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan pengambilan keputusan dalam membangun masyarakat yang damai, toleran dalam membendung radikalisasi agama (deradikalisasi).

1.6 KAJIAN PUSTAKA

Beberapa kajian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terkait dengan perdamaian dan anti kekerasan diantaranya adalah:

Maemunah (2007) mengkaji tentang *"Nilai-nilai Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Agama Islam (Telaah Materi dalam Panduan Pengembangan Silabus PAI untuk SMP Depdiknas RI 2006).* Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2007". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa materi Panduan Pengembangan Silabus PAI untuk SMP Depdiknas RI 2006, pada dasarnya telah terkandung nilai-nilai pendidikan multikultural tetapi masih sangat terbatas dan minimal.

Hanifah (2008) meneliti tentang *"Pendidikan Anti Kekerasan Berbasis Komunitas Untuk Anak Jalanan (Studi Kasus Program Pengorganisasian Komunitas Remaja Jalanan PKBI DIY Di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta)"*. Penelitian ini membahas tentang model pendidikan anti kekerasan untuk remaja jalanan di dalam sebuah komunitas yang diorganisir oleh PKBI DIY.

Indriyani (2009) meneliti tentang *"Signifikansi Pendidikan Multikultural Dalam Novel Dan Damai Di Bumi! Karya Karl May Terhadap Pendidikan Agama Islam"* Penelitian ini mengkaji tentang nilai-nilai pendidikan multikultural yang termuat dalam novel *"Dan Damai di Bumi"* dalam perspektif pendidikan Islam.

Ahmad Minan Zuhri (2010) meneliti tentang *Peace Education dalam Islam.* Penelitian ini mengkaji tentang konsep, dan urgensi pendidikan damai dalam Islam yang digali dari nash-nash al Qur'an melalui pendekatan deskriptif-analitik.

Abdurrahman Assegaf (2006) menulis buku berjudul *"Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep".* Buku ini mengulas tentang kondisi, kasus dan sekaligus konsep pendidikan tanpa adanya kekerasan, selain

itu juga dibahas tentang pendidikan tanpa kekerasan dalam perspektif pendidikan Islam.

Ashgar Ali Engineer menulis buku berjudul *"Liberalisasi Teologi Islam (Membangun Teologi Damai Dalam Islam)"* (Engineer, 2004). buku ini menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi cinta damai, bukan sebaliknya yang selama ini dipandang sebagai agama yang menyukai kekerasan oleh dunia barat.

Albertus Nugroho Widiyono meneliti tentang Kerukunan Antarumat Beragama; Sebuah Studi Kasus Melihat Visi Dialog FPUB Yogyakarta dalam Perbandingan dengan Visi Dialog Korelasional Paul F. Knitter. Penelitin ini mengkaji tentang visi dialog FPUB dan kemudian diperbandingkan dengan visi dialog korelasional pemikiran tokoh Paul F. Knitter.

Hasil studi pustaka di atas menunjukkan bahwa penelitian atau hasil kajian yang secara spesifik mengkaji tentang praktek, model, dan strategi-aplikatif *peace education* yang dilakukan oleh FPUB belum dilakukan. Penelitian yang pernah dilakukan hanya sebatas mengkaji konsep dan belum sampai memotret pelaksanaan dalam rangka deradikalisasi agama. Disinilah letak pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1.7 KERANGKA TEORI

1.7.1 *Peace Education* (Pendidikan Perdamaian)

Damai secara sederhana dapat dimaknai sebagai tidak adanya perang atau konflik dan kekerasan. Faktor penyebab terjadinya suasana damai adalah ketika individu memiliki rasa kedamaian dalam diri sendiri, memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi dan pikirannya agar tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain serta bisa memicu terjadinya konflik dan kekerasan. Perdamaian adalah konsep dan cara pandang yang positif baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain.

Perdamaian dapat didefinisikan dalam dua sisi, *pertama* damai yang "negatif", yaitu tidak adanya perang atau konflik kekerasan. Situasi ini dicapai

dengan pendekatan struktural, yaitu pencegahan setiap potensi konflik dengan cara mengontrol pihak-pihak yang bisa menyulut potensi konflik menjadi konflik terbuka dan menggunakan kekerasan. *Kedua,* damai yang positif, yaitu suasana yang sejahtera, adanya kebebasan dan keadilan yang menjadi dasar terciptanya suasana damai dalam suatu komunitas.

Ursula Franklin berpendapat bahwa damai bukan hanya sekedar tidak adanya perang, tetapi damai juga terciptanya keadilan dan hilangnya ketakutan dalam diri individu dan masyarakat. Ketakutan yang dimaksud adalah rasa tidak aman dari faktor ekonomi seperti takut tidak punya pekerjaan atau tempat tinggal yang layak. Franklin lebih jauh menyoroti pada apa yang disebut "sistem yang mengancam", yaitu sistem yang diciptakan oleh suatu kelompok untuk mengontrol dan mengatur individu atau kelompok lain dengan memberi mereka rasa takut dan ketidakpastian demi mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, untuk menciptakan perdamaian ataupun kehidupan yang damai harus dilakukan upaya untuk memenuhi rasa keadilan dan rasa aman individu atau komunitas, baik aman dari ancaman fisik, ekonomi ataupun ancaman dari aspek lainnya. Selain itu, para ahli dan praktisi *conflict resolution* (resolusi konflik) memahami damai bukan hanya bebas dari peperangan (*absence of war*) tapi mencakup adanya keadilan ekonomi, sosial dan budaya, serta bebas dari diskriminasi ras, kelas, jenis kelamin, dan agama (Khum, www.scribd.com).

Peace education pada dasarnya adalah sebuah proses untuk mendapatkan pengetahuan, pengembangan sikap, dan tingkah laku untuk dapat hidup saling menghormati, toleran, penuh perdamaian, saling membantu dan anti kekerasan *(non-violence).* Hal ini linier dengan program Majelis Umum PBB tahun 2000, yang mengeluarkan mandat kepada UNESCO untuk menetapkan bahwa tahun 2000 sebagai tahun budaya damai internasional (*International Year for the Culture of Peace*) dan dekade tahun 2001 sampai 2010 sebagai dekade budaya damai dan tanpa kekerasan (*International Decade for a Culture of Peace and Non-Violence for the Children of the World*). Aspek-aspek yang dikembangkan pada program *peace education* adalah kedamaian

dan anti kekerasan (*peace and non-violence*), hak asasi manusia (*human rights*), demokrasi (*democracy*), toleransi (*tolerance*), pemahaman antar bangsa dan antar budaya (*international and intercultural understanding*), serta pemahaman perbedaan budaya dan bahasa (*cultural and linguistic diversity*).

Peace education dapat diartikan sebagai model pendidikan yang mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar mampu mengatasi konflik atau masalahnya sendiri dengan cara kreatif dan tanpa kekerasan (Mahfud, 2007). *Peace education* mengajarkan rasa saling menghargai, mencintai , *fairness,* dan keadilan.

Pendidikan perdamaian *(peace education)* didasarkan pada filosofi anti kekerasan, cinta, perasaan saling menyakini, percaya, keadilan, kerja sama, saling menghargai dan menghormati sesama mahluk hidup di dunia (Metrid, 2007).

Peace Education mengedepankan keserasian tiga pilar penting dalam implementasinya, yaitu peserta didik, pendidik dan orang tua. Ketiga pilar tersebut merupakan pelaku aktif dalam proses penanaman nilai-nilai luhur dalam membangun perdamaian. Peran guru sebagai pendidik nilai-nilai dan ilmu pengetahuan. Siswa sebagai generasi muda yang akan meneruskan keberlangsungan bangsa diharapkan berperan pada sosialisasi nilai-nilai budaya damai dan anti kekerasan pada rekan sebaya. Sedangkan orang tua berperan sebagai mitra guru untuk mendorong, mendukung dan mengembangkan aktualisasi atau pelaksanaan budaya damai tanpa kekerasan.

Program pendidikan perdamaian yang disalurkan dengan resolusi konflik dan pemahaman multikultural termasuk suatu kegiatan yang didasarkan pada kemampuan individu dalam berpendapat, mencoba memahami dan mengerti orang lain dan hal-hal yang mendasari pemikiran mereka akan bermanfaat sebagai alat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah, misalnya rasisme, diskriminasi atau mengganggu orang lain (Zamroni, 2008: 35).

Pendidikan Perdamaian *(peace education)* adalah salah satu upaya pembelajaran yang bisa memberikan kontribusi dan mampu menciptakan warga negara yang lebih baik di dunia ini. Proses transformasi keduanya adalah dengan cara menanamkan filosofi yang mendukung dan mengajar tanpa kekerasan, yang juga berarti menjaga lingkungan dan kehidupannya sendiri sebagai manusia. Pendidikan perdamaian memberikan alternatif dengan mengajarkan kepada siswa bagaimana kekerasan bisa terjadi dan menginformasikan pengetahuan kepada siswa tentang isu-isu kritis dari pendidikan perdamaian yaitu menjaga perdamaian (*peacekeeping*), menciptakan perdamaian (*peacemaking*), dan membangun perdamaian (*peacebuilding*) (Zamroni, 2008: 35).

1.7.2 *Peace Education* dengan Pendekatan Multikultural

Salah satu aspek untuk mengetahui pelaksanaan peace education adalah adalah dengan pendekatan multikultural. Ricardo L. Garcia menjabarkan bahwa secara teknis pendidikan multikultural dapat diklasifikasikan dalam empat model dan strategi, yaitu (Garcia: 103-187).

1. *Ethic studies models,* yaitu peningkatan pengetahuan tentang budaya dan etnis dengan menggunakan metode dimasukkan dalam mata pelajaran.
2. *Bilingual education models,* yaitu kebijakan untuk menggunakan bahasa selain bahasa pengantar dengan tujuan memberi kemudahan bagi peserta didik yang kesulitan memakainya dan menggantinya dengan bahasa induk masing-masing.
3. *Human right strategy,* yaitu strategi pendidik dalam menciptakan suasana kondusif untuk belajar melalui *style* pendidikan yang demokratis dalam menyampaikan pelajaran yang berbasis pada etika dasar peserta didik.
4. *Intergroup relation strategy,* yaitu strategi pendidik dalam menciptakan hubungan harmonis antarsesama peserta didik. Keharmonisan

hubungan antarpeserta didik ini diharapkan dapat menanamkan rasa dan sikap mental untuk menghargai orang lain dalam kehidupannya.

Lebih lanjut Fattah Hanurawan (Hanurawan dan Weterwoth, 1998: 19-20) menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan multikulutral dijabarkan dalam:

1. Lingkungan latar belakang yang demokratis, yaitu kondisi didasarkan pada asas *equality, equity, justice, trust, and mutual understanding.*
2. Adanya kurikulum yang menjurus pada prespektif multicultural
3. Pemahaman pendidik tentang perspektif multicultural yang berimabas pada pengejawantahan isu kurikulum dalam kelangsungan proses belajar mengajar.

1.8 METODE PENELITIAN

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Menurut Agus Salim penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan pendekatan interpretatif terhadap setiap pokok persoalan yang dikajinya (Salim, 2006: 34). Alasan penggunaan metode ini karena ingin memahami dan mendiskripsikan realitas pendidikan perdamaian *(peace education)* dalam rangka deradikalisasi umat agama yang dipraktikkan di Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) Yogyakarta.

Adapun metode deskriptif analitik disini adalah metode yang berusaha menjelaskan fenomena sosial yang ada serta berusaha mencari gambaran fenomena yang terjadi seputar *peace education* dan deradikalisasi agama yang dilakukan FPUB.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. *Pertama,* wawancara mendalam *(deepth interviuw)* dengan berpedoman pada *interviuw guide* dan bersifat tak

struktur. Wawancara merupakan data primer dalam penelitian ini. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu kepada informan mengenai segala bentuk proses *peace education* dalam rangka deradikalisasi umat beragama. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh jawaban yang lebih luas dan bervariasi. Wawancara pun dilakukan seperti percakapan sehari-hari dan berjalan tidak formal (Rahayu dan Tristiadi, 2004: 74). Informan yang akan diwawancarai adalah pendiri FPUB, Pengurus, komunitas, jejaring komunitas, peserta *peace education,* dan stekholders strategis lainnya.

Kedua, observasi. dilakukan untuk memperoleh informasi tentang proses *peace education* dalam rangka deradikalisasi umat beragama yang dilakukan FPUB. Observasi yang akan dilakukan bersifat formal maupun tidak formal. Obervasi formal dilakukan untuk mengukur peristiwa tipe pelaku tertentu dalam periode waktu tertentu di lapangan. Sedangkan observasi tidak formal dilakukan selama melakukan kunjungan, termasuk pada saat mengumpulkan data-data lainnya.

Ketiga, metode dokumentasi. Dokumen yang akan dipelajari adalah teks-teks dan foto-foto kegiatan FPUB. Teks-teks berupa arsip profil FPUB, catatan kegiatan bulanan dan tahunan, dan buku-buku referensi. Sedangkan dokumen foto dan rekaman memberikan informasi visual tentang kegiatan praktis FPUB dalam program *peace education* dalam rangka deradikalisasi umat beragama.

1.8.3 Analisa data

Analisa data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Ketiga hal ini berhubungan satu sama lain, sebelum pada saat, dan sesudah pengumpulan data untuk membanguan analisis. Reduksi data merupakan proeses pemilahan data yang terkumpul dalam catatan lapangan ke dalam pengolahan data, penentuan bagian-bagian yang hendak dibuang, dipertajam, dan dikembangkan. Penayajian data merupakan proses pengelompokkan data-data untuk

menyimpulkan data, yang kemudian dilakukan deskripsi yang berisi penjelasan tematik sesuai dengan hasil penemuan lapangan. Verifikasi adalah upaya melakukan pengecekan kembali catatan-catatan lapangan untuk meneliti kembali kebenarannya, sehingga dapat diperoleh kesepakatan dengan obyek penelitian.

1.8.4 Triangulasi Data

Triangulasi yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan trianggulasi sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda (Moleong, 1996: 178). Adapun triangulasi sumber yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Kegiatan ini dilakukan dengan membandingkan hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti baik selama proses wawancara berlangsung maupun dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi.
b. Membandingkan data hasil wawancara antar informan yang berasal dari berbagai unsur FPUB.
c. Membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan. Kegiatan ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada seperti hasil penelitian, buku, artikel, dan lain-lain.

BAB II
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FPUB

2.1 Seketsa Historis Berdirinya FPUB

Embrio gagasan pendirian Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) berawal dari fenomena dan maraknya berbagai kerusuhan sosial-keagamaan bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Fenomena ini terjadi di akhir-akhir tahun 1996 dan kemudian nampak jelas dan semakin meluas menjelang pemilu tahun 1997. Beberapa daerah yang menjadi tempat konflik dan kerusuhan diantaranya adalah Situbondo, Tasikmalaya, Jakarta, Kupang dan terus menjalar di tempat-tempat lain di tanah air. Kerusuhan dan konflik ini berakibat kepada rapuhnya persatuan dan kesatuan bangsa yang telah di bina berathun-tahun lamanya. Hal ini mengundag kekhawatiran dan keresahan para tokoh agama dan masyarakat akan masa depan bangsa Indonesia.

Yogyakarta sebagai daerah yang menjadi rujukan persatuan, kesatuan dan kerukunan umat dengan berbagai latar belakang (Suku, Ras, Agama, Golongan, dan lain-lain) juga merasakan kekhawatiran dan keprihatinan atas berbagai kejadian tersebut. Masyarakat Yogyakarta juga khawatir jika berbagai kejadian kerusuhan bernuansa SARA tersebut menjalar dan terjadi di Yogyakarta. Lebih-lebihdi Yogyakarta disinyalir telah terjadi beberapa teror dibeberapa tempat ibadah seperti gereja, pura, vihara dan masjid serta beberapa pesantren.

Melihat hal tersebut maka DIAN/Interfidei *(Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia)* berinisiatif mengundang para tokoh masyarak, agama, mahasiswa, LSM, dan berbagai lembaga lain untuk mebincangkan dan berdiskusi terkait dengan berbagai peristiwa kerusuhan, konflik, kekerasan, dan teror bernuansa SARA yang terjadi. Gayung pun bersambut, undangan interfidei tersebut direspon dengan baik oleh berbagai kalangan sehingga

berkumpulah sekitar 23 orang yang terdiri dari para tokoh pelbagai agama dan kepercayaan, tokoh masyarakat, LK*i*S, PMKRI, aktivis mahasiswa dan lain-lain. Pada awal pembicaraan atau diskusi terjadi ketegangan dan saling curiga *(prejudice)*antar agama, golongan dan lembaga. Akan tetapi setelah dilakukan *sharing* pendapat, dialog, dan pengalaman tentang kerusuhan, teror, dan konflik suasana menjadi lebih tenang, cair dan lebih terbuka. Dalam pertemuan ini, para peserta mulai terbuka dan mempunyai pandangan lain bahwa kejadian kerusuhan, konflik dan teror yang terjadi antara tahun 1996 sampai menjelang pemilu tahun 1997 bukanlah suatu kebetulan, melainkan ada faktor lain (eksternal) yang inginberusaha mengalihkan berbagai masalah politik nasional yang berujung pada krisis kepercayaan terhadap penyelenggara negara dengan menjadikan konflik masyarakat bawah yang bernuansa SARA.

Akhir pertemuan pertama tersebut muncul gagasan danusulan untuk terus mengadakan pertemuan secara rutin di pesantren, gereja, klenteng, vihara, pura dan dibeberapa balai desa serta tempat-tempat lain secara bergantian atau bergilir yang membahas masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, kemanusiaan dan lain-lain yang dipandang dari sudut moral dan iman.

Selanjutnya, pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1997 di pesantren putri Nurul Ummahat, Kotagede, pimpinan KH. Abdul Muhaimin. Tema dalam pertemuan ini adalah **"menciptakan persaudaraan sejati".** Meskipun di tingkat elit kekuasaan dan para politisi terjadi konflik, tetapi yang diinginkan masyarakat bawah *(grass root)* adalah hidup damai, rukun, memperoleh keadilan serta hidup dalam persaudaraan sejati. Hal ini akan terjadi kalau masyarakat tingkat bawah yang ada perbedaan dalam ras, suku, agama, adat serta budaya menyadari sebagai pribadi ciptaan Tuhan yang sama; yang mampu bekerjasama dalam mengatasi dan memecahkan persoalan-persoalan hidup, gembira dalam kegembiraan orang lain dan ikut sedih dalam kesedihan orang lain.

Pada pertemuan kedua inilah disepakati bahwa komunitas atau kelompok ini bernama **"Forum Persaudaraan Umat Beriman"**, sebuah forum bersama yang melibatkan umat pelbagai agama, termasuk penghayat kepercayaan dan Kong Hu Cu. Dengan demikian pada tanggal 27 Februari 1997 itulah secara resmi dinyatakan waktu kelahiran atau berdirinya FPUB Yogyakarta. KH. Abdul Muhaimin menuliskan refleksinya seputar sejarah awal berdirinya FPUB.

> *"di tengah perubahan yang sangat drastis dalam peta perpolitikan Indonesia menjelang kejatuhan Soeharto, Forum Persaudaraan Umat Beriman Yogyakarta lahir situasi yang penuh ketegangan. Kerusuhan antaragama merebak di seantoro wilayah mulai dari Jatibening, Situbondo, Malang, Surabaya yang mengakibatkan rusaknya beberapa tempat ibadahdan memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Eskalasi kerusuhan tersebut menjalar dengan sangat cepat ke beberapa daerah. Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai daerah aman, tidak luput dari imbas ketegangan dan mulai terjadi letupan-letupan berupa pengerusakan tempat ibadah, teror melalui telephone gelap terhadap pastor, pendeta, Kyai semakin memperuncing suasana hubungan antaragama yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi kerusuhan berskala masif. Tepat pada tanggal 27 Februari 1997 beberapa tokoh agama yang sebelumnya telah terbiasa berkomunikasi sepakat untuk bertemu di Pondok Pesantren Nurul Ummahat Kotagede Yogyakarta dengan mengundang beberapa tokoh agama, aktivis LSM, tokoh pergerakan Mahasiswa untuk merespon dinamika sosial politik yang semakin menghawatirkan. Perteuan yang diikuti loleh sekitar 70 oarang berlangsung dalam suasana tegang. Nada saling tuduh dan saling tuntut masih mewarnai perbincangan masing-masing kelompok, sehingga sangat sulit menemukan kesepahaman bentuk dialog dan kerja sama antaragama yang produktif dan mangakar di kalangan akar rumput".* (Muhaimin, Suluh edisi 19 Tahun 2005: 14).

Lahirnya Forum semacam ini merupakan gejala khas Yogyakarta. TH. Sumarthana—seorang tokoh lintas imam—memberikan komentar terhadap berdirinya forum ini bahwa *"daerah Yogyakarta mempunyai suatu basis kultural yang kuat dan agama-agama memiliki pengalaman yang panjang terhadap pluralisme. Hal inilah yang menyebabkan gampang dan mudah diciptakan sebuah forum dimana agama-agama, secara bersama-sama*

menjalin kerjasama untuk menghadapi masalah kemasyarakatan atau gejala disintegrasi masyarakat".

Penggunaan kata "Umat Beriman", bukan Umat Beragama—pada Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB)—karenakelompok ini berpandangan bahwa persaudaraan tidak dibatasi oleh lima agama, melainkan siapa saja dan dari mana saja yang berkehendak baik dan menyembah Tuhan—entah "Tuhan" disebut apa. FPUB sangat menaruh hormat kepada semua orang yang beragama dan berkepercayaan yang menyembah Tuhan dengan tulus dan berlaku jujur.

FPUB tidak ingin menyatukan dan mencampuradukkan ajaran agama masing-masing serta tidak akan pernah mencampuri urusan dogmatis, ritual dan kehidupan intern masing-masing lembaga agama, sebab hal itu adalah urusan internal agama atau kepercayaan masing-masing. Sebaliknya, unsur inti ajaran yang bisa didekatkan untuk membentuk persaudaraan itulah yang akan digunakan sebagai dasarnya. Misalnya, perlunya mengasihi, menghormati, kepedulian, usaha bersama menciptakan perdamaian, usaha bantu membantu terutama untuk anggota masyarakat yang menderita, usaha penegakan kehidupan moral, etika dan lain-lain. Hal-hal itulah yang menjadi dasar pijakan untuk bekerjasama lintas iman dalam mengembangkan persaudaraan sejati dan solidaritas sosial dalam upaya memperbaiki nasib dan kondisi bangsa ini.

Bentuk forum sendiri mengasumsikan bahwa ini memang bukan lembaga atau institusi formal yang memiliki kepengurusan dan anggota, melainkan sebagai wadah kultural yang tanpa kepengurusan, tanpa AD/ART, tanpa kartu wadah hidup persaudaraan. FPUB juga tidak di bawah naungan suatu lembaga LSM, partai politik atau pemerintah. Forum ini merupakan bentuk alternatif dari lembaga-lembaga formal yang telah ada. Dengan kata lain bahwa FPUB sebenarnya merupakan sebuah forum non-struktural, melainkan bersifat komunitas (kultural). Menurut KH. Abdul Muhaimin—

koordinatorumum forum—upaya pencarian hubungan antaragama lewat struktur seperti MUI, PGI dan sebagainya mengalami hambatan politis. Sebab seringkali digunakan untuk kepentingan hegemoni kekuasaan, dengan kata lain bahwa lembaga-lembaga formal seperti itu tidak efektif.

Keberadaan FPUB sebagai sebuah forum merupakan sebuah wadah kultural yang dapat menjadi wadah bersama dalam mendialogkan, mendiskusikan, dan memberikan solusi-solusi alternatif atas berbagai masalah yang dihadapi umat terkait dengan keberagamaan. Ditegaskan bahwa kehadirian FPUB bukanlah semata-mata bentuk reaksi atas situasi dan kondisi sosial yang diwarnai konflik bernuansa SARA, tetapi pada dasarnya merupakan upaya atau ikhtiar preventif dari berbagai komponen masyarakat yang memiliki keprihatinan dan tanggung jawab bersama atas ketentraman dan kenyamanan kehidupan masyarakat yang dipenuhi perdamaian. Perdamaian yang didasari persaudaraan sejati dan solidaritas sosial inilah yang menjadi spirit gerakan FPUB.[1]

2.2 Visi dan Misi FPUB

FPUB pada dasarnya merupakan wadah kultural yang tanpa kepengurusan sebagaimana lembaga formal struktural, dan tanpa AD/ART. FPUB juga tidak di bawah naungan suatu lembaga, LSM, partai politik atau pemerintah. Forum ini merupakan bentuk alternatif dari lembaga-lembaga formal yang telah ada. Dengan kata lain bahwa FPUB sebenarnya merupakan forum non-struktural dan merupakan forum kultural yang bersifat komunitas. Alasan forum ini merupakan forum kultural adalah bahwa selama ini upaya pencarian hubungan antaragama lewat struktur seperti MUI, PGI dan sebagainya mengalami hambatan politis. Sebab seringkali digunakan untuk kepentingan hegemoni kekuasaan. Oleh karenanya lembaga-lembaga

---

[1] Sejarah berdirinya FPUB ini dirangkum dari hasil informasi dan wawancara dengan KH. Abdul Muhaimin, Ngatiyar, dan www.fpub.or.id. Dari data yang ada terdapat dua versi tentang waktu berdirinya FPUB. Pertama menyebutkan bahwa berdirinya FPUB pada tanggal 24 Maret 1997. Kedua menyebutkan pada tanggal 27 Pebruari 27.

formal seperti itu tidak efektif, dan akan lebih efektif dengan forum-forum kultural.[2]

Sebagai forum kultural, bukan berarti FPUB tidak mempunyai visi, misi dan tujuan. Justru visi, misi dan tujuan FPUB inilah yang menjadi perekat, pemersatu, dan bergabungnya berbagai kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang.

Visi FPUB adalah "terwujudnya komunitas antariman yang penuh kedamaian dengan penghayatan/ keyakinan yang kuat kepada Tuhan dalam nilai kemanusiaan, solidaritas, dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia" *(peaceful intefaith community with strong faith to God, solidarity and human rights appreciation).*

Visi FPUB tersebut kemudian dirinci lebih lanjut dalam empat misi FPUB. Lima misi tersebut adalah; *pertama,* menanamkan semangat kehidupan antarumat beriman yang penuh damai berdasarkan dimensi-dimensi universal dari iman dan agama-agama melalui aksi-aksi dan bertindak sebagai kekuatan moral untuk keadilan dan solidaritas. *Kedua,*memberdayakan masyarakat agar bebas dari keputusan etis dari iman-iman mereka masing-masing. *Ketiga,* mempromosikan komunitas anti kekerasan. *Keempat,* bergerak sebagai kekuatan moral dami negara yang damai dan adil menuju dunia yang lebih baik.[3]

Tujuan awal pendirian FPUB adalah untuk memutus rantai kerusuhan, kekerasan dan konflik antar umat beragama yang merebak pada saat itu, dan mencapai persaudaraan sejati antar iman. Romo Suyatno Hadiatmaja memberikan keterangan dalam acara penerimaan penghargaan Tasrif Award:

> *"keberadaan forum ini sebagai upaya mengembalikan nilai-nilai luhur bangsa yang telah luntur. Keberadaan form ini bukan bertujuan meraih penghargaan tersebut, namun sebagai wujud keprihatinan atas*

---

[2] Wawancara dengan KH. Abdul Muhaimin 21 Juli 2011

[3] Brosur FPUB dalam bahasa Inggris tahun 2002 dan diterjemahkan oleh Albertus Nugroho Widiyono dalam Tesisnya Kerukunan Antarumat Beragama; Sebuah Studi Kasus Melihat Visi Dialog FPUB Yogyakarta dalam Perbandingan dengan Visi Dialog Korelasional Paul F. Knitter. (Yogyakarta: PPs Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2009)

munculnya berbagai kerusuhan yang terjadi pada pada akhir 1996 sampai 199/2000. FPUB bersifat lintas agama dan melibatkan tokoh seperti kyai (Islam), Pastor (Katolik), pendeta (Krsten) dan tokoh serta aktivis keagamaan Hindu, Budha, Kong Hu Cu dan kepercayaan. Di tengah situasi krisis dan kehidupan yang penuh konflik yang mengancam kehidupan measyarakat berbangsa, ternyata FPUB Yogyakarta tampil menjadi forum yang berhasil mempertemukan orang-orang lintas agama untuk tidak berhenti melakukan dialog, sharing dan kerjasama untuk menyerukan dan menyebarluaskan persaudaraan sejati. Hal ini dilakuakan secara terus menerus melalui berbagai kegiatan termasuk doa-doa bersama pada saat-saat genting sejak 1996. Selain itu, FPUB Yogyakarta dengan segala keterbatasannya terlibat aktif dalam gerakan reformasi baik dalam bentuk pemberian dukungan moral, akomodasi bahkan kritik terhadap aktivis yang tidak manusiawi".[4]

Visi, misi,dan tujuan FPUB tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang diformat dalam empat bidang atau divisi. Pembentukan bagian-bagian atau divisi ini dimaksudkan untuk mempermudah dan mengefektifkan dalam mengorganisir gerakan. Setiap bidang dipegang oleh seorang koordinator. Kempat bidang tersebut adalah bidang dialog agama, bidang *Peace Campaign* (kampanye damai), bidang Media dan Informasi, dan bidang Transformasi sosial.

2.2.1 Bidang Dialog Agama

Koordinator bidang dialog agama adalah pendeta Bambang Subagyo. Bidang ini fokus pada kerja-kerja seputar dialog antaragama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dialog-dialog dan diskusi-diskusi yang di lakukan FPUB selama ini dimaksudkan untuk merangsang dan menumbuhkan inisiatif masyarakat berupa *action plan* terhadap berbagai persoalan yang dihadapinya. Bila dibandingkan dengan kegiatan serupa yang dilakukan komponen masyarakat yang lain, terutama di kalangan akademisi,

---

[4] Wawancara Rm. Y. Suyatno Hadiatmaja dengan wartawan Indonesia "FPUB Yogya Raih Tasrif Award 2000". Dalam Http://www.Indonesia.com. Dan dikutip oleh Albertus Nugroho Widiyono dalam Tesisnya Kerukunan Antarumat Beragama; Sebuah Studi Kasus Melihat Visi Dialog FPUB Yogyakarta dalam Perbandingan dengan Visi Dialog Korelasional Paul F. Knitter. (Yogyakarta: PPs Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2009), hal. 29

gerakan dialog antariman (agama) yang dilakukan FPUB memang terkesan jauh dari formalitas. Sifatnya yang begitu familiar menjadikan dialog yang dilakukan lebih terlihat akrab penuh nuansa kedamaian dan persaudaraan.

Dialog antaragama yang dilakukan oleh FPUB selalu diadakan secara bergilir baik di masjid, gereja, vihara, pura, maupun kelenteng. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat bahwa tempat-tempat ibadah tersebut bisa dijadikan sebagai sarana membangun kebersamaan yang dilandasi oleh semangat persaudaraan sejati. Sebab, sampai saat ini bagi sebagian besar pemeluk agama (masyarakat) masih ada pandangan yang mensakralisasikan tempat-tempat ibadah sehingga seringkali muncul klaim haram (kafir) bagi penganut agama atau keyakinan yang berbeda. Dengan demikian, gerakan dialog antaragama yang dilakukan secara bergantian di tempat-tempat ibadah pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan wacana "desakralisasi" terhadap tempat-tempat ibadah tersebut.

2.2.2 Bidang *Peace Campaign* (Kampanye Damai)

Bidang *Peace Campaign* (Kampanye Damai) dikoordinatori oleh Romo Suyatno Hadiatmaja. Selain melakukan dialog-dialog lintas iman di tingkat masyarakat bawah, FPUB juga melakukan gerakan kampanye damai. Kampanye damai dilakukan dengan penyebaran wacana dan ide-ide perdamaian baik melalui aksi doa bersama lintas iman, aksi kemanusiaan, penyebaran selebaran, pamflet, stiker, spanduk dan lain sebagainya.

Gerakan kampanye damai yang dilakukan FPUB selama ini bersifat momentum, dalam arti mengisi moment yang ada dan disesuaikan dengan wacana dan isu yang berkembang di masyarakat. Misalnya, ketika terjadi invasi Irak oleh Amerika, FPUB mengeluarkan pernyataan bersama deklarasi tolak perang. Ketika terjadi aksi kekerasan terhadap kelompok tertentu seperti Ahmadiyah, FPUB mengeluatkan pernyataan tolak kekerasan, dan lain-lain. Gerakan-gerakan kampanye damai lebih dimaksudkan memberikan

himbauan dan seruan moral akan pentingnya perdamaian dan anti kekerasan dengan dalih apapun, lebih-lebih agama.

2.2.3 Bidang Media dan Informasi

Koordinator bidang ini adalah Muhammad Ihrom. Bidang media dan informasi dimaksudkan sebagai media menyebarluaskan wacana interfaith melalui publikasi dan informasi, baik cetak maupun elektronik kepada masyarakat. Gerakan interfaith yang dilakukan FPUB baik di level wacana berpikir maupun praksis lapangan memang perlu didukung dan ditopang oleh media. Media setidaknya memberikan kontribusi penting untuk menyebarluaskan secara kognitif kepada masyarakat tentang pentingnya perdamaian dan persaudaraan sehingga diharapkan mampu diwujudkan ke dalam aksi dan gerakan nyata.

Upaya melakukan publikasi dan informasi tentang wacana gerakan interfaith di kalangan masyarakat, FPUB menerbitkan majalah lintas iman bernama SULUH. Media ini dimaksudkan untuk mentransformasikan wacana berpikir tentang pluralisme, HAM, demokrasi, dan lain sebagainya. Majalah SULUH sebagai media publikasi dan informasi yang dimiliki FPUB merupakan media yang *concern* membahas dan mengupas tentang persaudaraan sejati lintas iman dengan menampilkan wacana dialogis, pluralis, inklusif dan transformatif. Majalah ini dikemas dengan menggunakan dua bahasa, yakni Indonesia dan Inggris dan sejak pertama kali diterbitkan pada awal tahun 2000 sampai saat ini, majalah ini telah disebarluaskan ke pelbagai kelompok interfaith di Asia dan Eropa.

Selain menerbitkan majalah SULUH, FPUB juga melakukan kerjasama dengan media cetak dan elektronik, seperti surat kabar, radio dan televisi. Kerjasama ini dimaksudkan untuk memperluas jaringan dalam mengembangkan gerakan dialog antaragama pada level masyarakat.

2.2.4 Bidang Transformasi Sosial

Koordinator bidang trasformasi sosial adalah Rendra. Bidang transformasi sosial dimaksudkan sebagai wadah atau bidang dalam mepraksiskan gagasan-gagasan FPUB dalam kehidupan sosial-kebaragamaan ditengah-tengah masyarakat. Bidang keempat ini (transformasi sosial), merupakan bidang baru yang mulai ada sejak tahun 2011 ini. Bidang ini dianggap penting sebab sebagai bidang kerja riil dalam rangka membumikan perdamaian dan persaudaraan sejati antar umat beriman dalam berbagai kegiatan sosial.

2.3 Program-Program Kegiatan FPUB

FPUB dengan gerakan interfaithnya, pada dasarnya merupakan suatu kelompok lintas iman yang alternative. Artinya FPUB sedapat mungkin tampil beda dengan kelompok atau lembaga yang telah ada dan sejenis. FPUB memang bukan sekedar wadah saresehan tetapi wadah pengembangan wacana untuk berbuat sesuatu dalam menumbuhkan persaudaraan sejati yang bermoral dan beriman. Dan untuk menterjemahkan visi misinya pada aras masyarakat *(grass root),* sejak awal berdirinya sampai saat ini FPUB telah menyelenggarakan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Menyelenggarakan diskusi-diskusi informal atau saresehan secara bergilir baik di masjid, gereja, vihara, pura, kelenteng, padepokan, balai desa maupun di kampus-kampus guna membangun saling pengertian dan perdamaian, di samping juga mencoba mencari solusi internal atas masalah-masalah di wilayah masing-masing.
2. Menyelenggarakan doa dan renungan bersama pada hari-hari besar keagamaan maupun hari-hari besar nasional. Semisal, menjelang pemilu 1997, menjelang sidang umum 1998, peringatan 27 Juli dll.
3. Mengadakan pameran dan refleksi bersama pada bulan kitab kaum beriman, setiap bulan september.

4. Menyampaikan kritik dan seruan kepada pihak-pihak yang melanggar norma moral baik kelompok tertentu maupun penyelenggara negara agar mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.
5. Membantu mencarikan jalan keluar bagi masyarakat yang sedang terbelenggu oleh kesulitan baik di bidang rohani maupun jasmani.
6. Mengadakan diskusi dan dialog yang menyangkut masalah-masalah sosial seperti narkoba, pergaulan bebas dan kemerosotan akhlak, dan sebagainya.
7. Penyebaran wacana dan ide-ide perdamaian baik melalui aksi kemanusiaan, penyebarluasan selebaran, pamflet, stiker, spanduk.
8. Menjalin relasi dengan kelompok-kelompok interfaith di pelbagai tempat baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri.
9. Bekerjasama dengan pelbagai media cetak dan elektronik memproklamirkan perdamaian dan menyebarluaskan wacara pencerahan masyarakat.
10. Penerbitan majalah persaudaraan sejati lintas iman 'interfaith magazine' bernama SULUH yang dikemas dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang telah disebarluaskan ke pelbagai kelompok interfaith di Asia dan Eropa.

Program-program kegiatan tersebut terus berjalan dan berkembang hingga saat ini dan akan datang sesuai dengan visi dan misi serta tujuan FPUB yaitu terwujudnya komunitas antariman yang penuh kedamaian dengan penghayatan atau keyakinan yang kuat kepada Tuhan dalam nilai kemanusiaan, solidaritas, dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia. Berbagai program kegiatan dikemas dalam berbagai bentuk akulturasi budaya dengan sangat menghormati kearifan-kearifan lokal yang ada. Seperti "lampah ratri". Lampah ratri adalah sebuah laku tirakat dalam tradisi jawa. Lampah ratri berarti berjalan diam atau membisu yang dilakukan di malah hari. Saat melakukan lampah ratri semua peserta melakukan tapa bisu tidak berbicara sepatah katapun dengan peserta lainnya serta memanjatkan doa.

Prosesi atau laku budaya ini merupakan bentuk "nguri-uri" napak tilas Sunan Kalijaga yang berjasa di empat masa kerajaan yaitu majapahit, demak, pajang dan mataram Islam.

2.4 Pengurus FPUB

Sebagimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa FPUB pada dasarnya bukan lembaga formal-struktural, akan tetapi lebih merupakan lembaga kultural-komunitas. Kepengurusan—sebenarnya kurang tepat jika disebut pengurus—yangada bukanlah sebagaimana kepengurusan yang ada pada organisasi-oragnisasi formal. Kepengurusan dimaksudkan hanya sebagai koordinator forum dan bukan merupakan struktur hirarkhis. FPUB adalah milik komunitas atau forum, sehingga pengelolaan atau pelaksanaan kegiatannya juga menjadi tanggungjawab bersama. Akan tetapi untuk memudahkan pengelolaan dan pengordiniran dibentuklah koordinator dan bidang-bidang yang bertumpu pada prinsip persaudaraan sejati.

Koordinator tersebut meliputi; koordinator Umum FPUB adalah KH. Abdul Muhaimin, koordinator bidang dialog agama adalah pendeta Bambang Subagyo, koordinator bidang *Peace Campaign* (Kampanye Damai) adalah Romo Suyatno Hadiatmaja, Koordinator media dan informasi adalah Muhammad Ihrom, dan koordinator bidang trasformasi sosial adalah Rendra. Sedangkan beberapa personal yang *"ngesuhi"* roda perjalanan FPUB adalah:

1. K.H. Abdul Muhaimin

Pondok Pesantren Putri Nurul Umahat,

Prenggan, Kotagede, Yogyakarta Telp. (0274)375120

2. Rm. Y. Suyatno Hadiatmaja, Pr

Gereja Katolik St. Josep, Jl. Garuda No. 14, Medari, Sleman, Telp.(0274)866325 HP. 081 229 66634

3. Pdt. Bambang Subagyo

GKJ Ambarukmo

Karangbendo, Yogyakarta, Telp. (0274)519919

4. Gde Sukadana

Jogja Gandhi Vidyapith Asram

Pogung Lor SIA XV F 19 Sleman

Yogyakarta, Telp. (0274)519452

5. Haksu Tjhie Tjay Ing

Matakin, Jl. Jagalan 15, Surakarta, Telp. (0271)637488

6. Bikhu Sri Pannyavaro Maha Thera

Vihara Mendut, Mungkid, Magelang, Telp. (0293)788236, fax. (0293)788173

7. Al. B. Koesmartono

Jl. Kresno 135 Bantulan, Sidoarum, Sleman

Yogyakarta, Telp. (0274)98189

8. Toto Baroto

Surokarsan, Yogyakarta, Telp. (0274)881294

9. Soedjonoworo

Jl. Bromo Blok C No. 6 Griya Arga Permai Kwarasan, Yogyakarta Telp. 516351

10. Effendi J. Ir. SU.

Pogung Baru No. F 16, Sinduadi, Mlati, Sleman

Telp. (0274)589654

2.5 Sasaran Kegiatan

FPUB sejak awal telah komitmen untuk terus mengembangkan gerakan interfaith di aras masyarakat sebagai gerakan kultural. Gerakan interfaith (dialog antaragama) yang dilakukan FPUB lebih pada berbasis komunitas. Artinya, semua elemen masyarakat dari berbagai macam golongan dapat turut serta secara aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan FPUB.

2.6 Sumber Dana

Sejak awal FPUB telah sepakat dan komitmen untuk tidak terikat oleh kelompok resmi atau tidak resmi dari manapun dengan harapan tetap bisa

berdiri tegak dalam situasi apapun. Oleh karenanya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan FPUB didanai atau diperoleh dari swadaya, bantuan spontan para simpatisan maupun para pemerhati lokal. Namun dalam perkembangannya, sejak tahun 2003 FPUB memperoleh bantuan dana untuk kegiatan-kegiatannya dari lembaga luar negeri *CCFD (Comite Catholique Contre La Faim Et Pour Le Developpement)* Prancis.

Lembaga donor dari luar negeri tersebut yang memberikan bantuan dana kepada FPUB semata-mata hanya sebagai *supporting system* dalam kegiatan-kegiatan FPUB dan sifatnya tidak mengikat.

MILIK PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN KALIJAGA

BAB III

PEACE EDUCATION DAN DERADIKALISASI UMAT BERAGAMA

3.1 Konsep *Peace Education* (Pendidikan Perdamaian)

Damai secara sederhana dapat dimaknai sebagai tidak adanya perang atau konflik dan kekerasan. Faktor penyebab terjadinya suasana damai adalah ketika individu memiliki rasa kedamaian dalam diri sendiri, memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi dan pikirannya agar tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain serta bisa memicu terjadinya konflik dan kekerasan. Perdamaian adalah konsep dan cara pandang yang positif baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain.

Perdamaian dapat didefinisikan dalam dua sisi, *pertama* damai yang "negatif", yaitu tidak adanya perang atau konflik kekerasan. Situasi ini dicapai dengan pendekatan struktural, yaitu pencegahan setiap potensi konflik dengan cara mengontrol pihak-pihak yang bisa menyulut potensi konflik menjadi konflik terbuka dan menggunakan kekerasan. *Kedua,* damai yang positif, yaitu suasana yang sejahtera, adanya kebebasan dan keadilan yang menjadi dasar terciptanya suasana damai dalam suatu komunitas.

Ursula Franklin berpendapat bahwa damai bukan hanya sekedar tidak adanya perang, tetapi damai juga terciptanya keadilan dan hilangnya ketakutan dalam diri individu dan masyarakat. Ketakutan yang dimaksud adalah rasa tidak aman dari faktor ekonomi seperti takut tidak punya pekerjaan atau tempat tinggal yang layak. Franklin lebih jauh menyoroti pada apa yang disebut "sistem yang mengancam", yaitu sistem yang diciptakan oleh suatu kelompok untuk mengontrol dan mengatur individu atau kelompok lain dengan memberi mereka rasa takut dan ketidakpastian demi mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, untuk menciptakan perdamaian ataupun kehidupan yang damai harus dilakukan upaya untuk memenuhi rasa keadilan dan rasa aman individu atau komunitas, baik aman dari ancaman fisik, ekonomi ataupun ancaman dari aspek lainnya. Selain itu, para ahli dan

praktisi *conflict resolution* (resolusi konflik) memahami damai bukan hanya bebas dari peperangan (*absence of war*) tapi mencakup adanya keadilan ekonomi, sosial dan budaya, serta bebas dari diskriminasi ras, kelas, jenis kelamin, dan agama (Khum, www.scribd.com).

Peace education pada dasarnya adalah sebuah proses untuk mendapatkan pengetahuan, pengembangan sikap, dan tingkah laku untuk dapat hidup saling menghormati, toleran, penuh perdamaian, saling membantu dan anti kekerasan *(non-violence).* Hal ini linier dengan program Majelis Umum PBB tahun 2000, yang mengeluarkan mandat kepada UNESCO untuk menetapkan bahwa tahun 2000 sebagai tahun budaya damai internasional (*International Year for the Culture of Peace*) dan dekade tahun 2001 sampai 2010 sebagai dekade budaya damai dan tanpa kekerasan (*International Decade for a Culture of Peace and Non-Violence for the Children of the World*). Aspek-aspek yang dikembangkan pada program *peace education* adalah kedamaian dan anti kekerasan (*peace and non-violence*), hak asasi manusia (*human rights*), demokrasi (*democracy*), toleransi (*tolerance*), pemahaman antar bangsa dan antar budaya (*international and intercultural understanding*), serta pemahaman perbedaan budaya dan bahasa (*cultural and linguistic diversity*).

3.1.1 Kedamaian dan anti kekerasan (*peace and non-violence*)

Kedamaian dan anti kekerasan (*peace and non-violence*) merupakan aspek penting dalam mewujudkan harmoni, toleransi, dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat yang sangat beragam. Kedamaian dan anti kekerasan menyadarkan peserta terhadap pentingnya penyelesaian setiap masalah dan perbedaan dengan dialog dan menghindari segala bentuk kekerasan. Tindakan kekerasan apapun dan atas nama apapun tidak akan pernah apat menyelesaikan masalah, bahkan akan terus menimbulkan masalah-masalah baru.

3.1.2 Hak Asasi Manusia (*human rights*)

Hak Asasi Manusia (*human rights*) mengajarkan penghormatan terhadap kebebasan seseorang yang merupakan haknya yang diberikan Tuhan kepada manusia. HAM secara normatif dimengerti sebagai hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada pancasila yang berarti Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain,maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia,yakni:

a) Undang – Undang Dasar 1945
b) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
c) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut :

1. Hak – hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
2. Hak – hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
3. Hak – hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
4. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality).
5. Hak – hak asasi sosial dan kebudayaan (social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untukmengembangkan kebudayaan.
6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.

3.1.3 Demokrasi (*democracy*)

Demokrasi (*democracy*) mengajarkan terhadap kebersamaan dan kesamaan hak dan kuwajiban dalam kehidupan berbangsas dan bernegara. Dimana semua warga negara dewasa turut berpatisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Pemerintah di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga Negara, menegakkan *rule of*

law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Pemehaman terhadap demokrasi memberikan manfaat tentang kesetaraan dan kesamaan sebagai warga negara, memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Umum, pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar, dan pembaruan kehidupan sosial.

3.1.4 Toleransi *(tolerance)*

Toleransi, *tolerance* (Inggris:); *tasamuh* (Arab) berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Secara etimologis, toleransi adalah kesabaran, ketahanan emosional, dan kelapangan dada. Sedangkan secara terminologis toleransi berarti bersifat atau bersikap menenggang—menghargai, membiarkan, membolehkan—pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya (Hutabarat, www.google.com). Jadi toleransi beragama secara sederhana dapat diartikan sebagai sikap sabar dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama-agama lain.

Pemahaman terhadap toleransi sangat penting dalam usaha membangun masyarakat yang damai, dan penuh kasih, lebih-lebih masyarakat yang multikultural. Dalam masyarakat multikultur seperti Indonesia gerakan dialog antaragama harus ditopangkan oleh toleransi kultural, yakni tata laku kehidupan. Ia bukan semata-mata didasarkan pada toleransi antarkeberimanan, namun seyogyanya dibingkai dalam toleransi antarkemanusiaa. Bukan hanya toleransi dalam pengertian pasif, akan tetapi toleransi aktif yaitu kesediaan untuk secara aktif menghormati, mengakui dan secara partisipatif membagun perdamaian.

3.1.5 Pemahaman antar bangsa dan antar budaya (*international and intercultural understanding*)

Pemahaman antar bangsa dan antar budaya (*international and intercultural understanding*) memberikan penyadaran bahwa pada setiap bangsa atau daerah mempunyai kekhasannya masing-masing. Bahkan seringkali saling bertolak belakang. Di satu budaya sikap tertentu dapat diterima, namun dalam budaya yang lain tidak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap lintas bangsa dan budaya akan menghantarkan kepada toleransi lintas budaya sehingga perbedaan itu tidak mengakibatkan persoalan atau kesalahpahaman. Dalam banyak kasus, konflik budaya mudah ditemui di berbagai tempat pertemuan multi budaya. Dengan pemahaman ini konflik-konflik tersebut dapat tereliminir.

3.1.6 Pemahaman perbedaan budaya dan bahasa (*cultural and linguistic diversity*)

Pemahaman perbedaan budaya dan bahasa (*cultural and linguistic diversity*) menghantarkan kepada kesadaran akan keanekaragaman budaya dan bahasa serta dialek. Keragaman budaya dan bahasa tersebut satu sisi merupakan kekayaan yang sangat berharga, akan tetapi di sisi lain dapat berpotensi sebagai pemicu konflik dan disharmoni. Sehingga pemahaman terhadap perbedaan budaya dan bahasa (*cultural and linguistic diversity*) dimaksudkan untuk menyadari keragaman dan dikelola sebagai kekayaan dan rahmat.

Peace education dapat diartikan sebagai model pendidikan yang mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar mampu mengatasi konflik atau masalahnya sendiri dengan cara kreatif dan tanpa kekerasan. *Peace education* mengajarkan rasa saling menghargai, mencintai , *fairness,* dan keadilan.

Pendidikan perdamaian *(peace education)* didasarkan pada filosofi anti kekerasan, cinta, perasaan saling menyakini, percaya, keadilan, kerja

sama, saling menghargai dan menghormati sesama mahluk hidup di dunia (Metrid, 2007).

Peace Education mengedepankan keserasian tiga pilar penting dalam implementasinya, yaitu peserta didik, pendidik dan orang tua. Ketiga pilar tersebut merupakan pelaku aktif dalam proses penanaman nilai-nilai luhur dalam membangun perdamaian. Peran guru sebagai pendidik nilai-nilai dan ilmu pengetahuan. Siswa sebagai generasi muda yang akan meneruskan keberlangsungan bangsa diharapkan berperan pada sosialisasi nilai-nilai budaya damai dan anti kekerasan pada rekan sebaya. Sedangkan orang tua berperan sebagai mitra guru untuk mendorong, mendukung dan mengembangkan aktualisasi atau pelaksanaan budaya damai tanpa kekerasan.

Program pendidikan perdamaian yang disalurkan dengan resolusi konflik dan pemahaman multikultural termasuk suatu kegiatan yang didasarkan pada kemampuan individu dalam berpendapat, mencoba memahami dan mengerti orang lain dan hal-hal yang mendasari pemikiran mereka akan bermanfaat sebagai alat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah, misalnya rasisme, diskriminasi atau mengganggu orang lain (Zamroni, 2008: 35).

Pendidikan Perdamaian *(peace education)* adalah salah satu upaya pembelajaran yang bisa memberikan kontribusi dan mampu menciptakan warga negara yang lebih baik di dunia ini. Proses transformasi keduanya adalah dengan cara menanamkan filosofi yang mendukung dan mengajar tanpa kekerasan, yang juga berarti menjaga lingkungan dan kehidupannya sendiri sebagai manusia. Pendidikan perdamaian memberikan alternatif dengan mengajarkan kepada siswa bagaimana kekerasan bisa terjadi dan menginformasikan pengetahuan kepada siswa tentang isu-isu kritis dari pendidikan perdamaian yaitu menjaga perdamaian (*peacekeeping*), menciptakan perdamaian (*peacemaking*), dan membangun perdamaian (*peacebuilding*).

3.2 *Peace Education* dan Pendidikan Multikultural

Model pendidikan yang seiring dengan pendidikan perdamaian *(peace education)* adalah pendidikan multikultural *(multiculture education).*Antara pendidikan perdamai dan pendidikan multikultural adalah bersinergi dan dapat dikatakan bahwa pendidikan perdamaian merupakan kelanjutan dari pendidikan multikultural yang lebih praksis-aplikatif.

Pendidikan multikultural merupakan proses upaya untuk mewujudkan semangat dari aliran atau paham multikulturalisme. Secara etimologis multikulturalisme dibentuk dari kata multi yang artinya banyak, kultur artinya budaya, dan isme yang bermakna suatu aliran atau paham (Mahfudz, 2006: 75). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik.

Pendidikan multikultural merupakan wacana lintas batas *(border crossing)* serta lintas disiplin ilmu pengetahuan, antara disiplin satu dengan lainnya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan multikultural terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial *(social justice),* demokrasi dan hak asasi manusia. Pendidikan multikultural juga berkaitan dengan isu-isu politik, sosial, kultural, moral, dan agama. Di samping itu, pendidikan multikultural juga berusaha untuk menjembatani wilayah yang berpotensi muncul konflik, seperti, relasi gender, hubungan antar agama, kelompok kepentingan, serta bentuk-bentuk lain dari keragaman (Baidhawy, 2005: 6.).

Latar belakang pendidikan multikulural diawali oleh berkembangnya gerakan ideologi atau paham multikulturalisme di negara-negara Barat yaitu Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Australia yang merupakan wacana dan gerakan untuk merevisi *politics of difference* (politik perbedaan) (Darmawan, 2005: 168). Gerakan *politics of difference* terjadi selama tahun 1950-an dan tahun 1960-an (Ritzer, 2005: 323) yaitu suatu gerakan untuk mendorong lahirnya kebijakan baru dalam mengatur kedudukan kelompok-kelompok

kultural minoritas dalam hubungannya dengan kultur dominan atau mayoritas. Dalam bidang pendidikan, multikulturalisme berarti pengakuan terhadap kontribusi semua kelompok kultural terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kesusasteraan. Dengan demikian kurikulum yang dikembangkan harus pula mencakup semua materi dari berbagai kultur yang ada (Darmawan, 169). Di Amerika Serikat perkembangan pendidikan multikultural berawal dari penghapusan praktik segregasi dari kelompok warga negara Amerika yang berasal dari Afrika. Praktik segregasi tersebut ditentang sangat keras oleh gerakan-gerakan *Civil Rights* yang dipelopori oleh Martin Luther King, akhirnya gerakan tersebut terus mengalami perkembangan dengan pesat dan merembet pada dunia pendidikan.

Jika pada pendidikan multikultural berupaya mewujudkan semangat dari aliran atau paham multikulturalisme berupa pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik, pada pendidikan perdamaian mengupayakan sebuah proses pembelajaran yang dapat mewujudkan pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan dan keragaman budaya yang ada. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan dan keragaman budaya akan berkontribusi besar terhadap penciptaan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Lebih-lebih pada sebuah negera yang tingkat pluralitasnya tinggi seperti Indonesia. Proses transformasi pendidikan adalah dengan cara menanamkan filosofi yang mendukung dan mengajar tanpa kekerasan, yang juga berarti menjaga lingkungan dan kehidupannya sendiri sebagai manusia.

Pendidikan perdamaian memberikan alternatif dengan mengajarkan kepada siswa bagaimana kekerasan bisa terjadi dan menginformasikan pengetahuan kepada siswa tentang isu-isu kritis dari pendidikan perdamaian yaitu menjaga perdamaian (*peacekeeping*), menciptakan perdamaian (*peacemaking*), dan membangun perdamaian (*peacebuilding*) (Zamroni, 35).

Salah satu aspek untuk mengetahui pelaksanaan *peace education* adalah adalah dengan pendekatan multikultural. Ricardo L. Garcia 9103-187) menjabarkan bahwa secara teknis pendidikan multikultural dapat diklasifikasikan dalam empat model dan strategi, yaitu:

1. *Ethic studies models,* yaitu peningkatan pengetahuan tentang budaya dan etnis dengan menggunakan metode dimasukkan dalam mata pelajaran.
2. *Bilingual education models,* yaitu kebijakan untuk menggunakan bahasa selain bahasa pengantar dengan tujuan memberi kemudahan bagi peserta didik yang kesulitan memakainya dan menggantinya dengan bahasa induk masing-masing.
3. *Human right strategy,* yaitu strategi pendidik dalam menciptakan suasana kondusif untuk belajar melalui *style* pendidikan yang demokratis dalam menyampaikan pelajaran yang berbasis pada etika dasar peserta didik.
4. *Intergroup relation strategy,* yaitu strategi pendidik dalam menciptakan hubungan harmonis antarsesama peserta didik. Keharmonisan hubungan antarpeserta didik ini diharapkan dapat menanamkan rasa dan sikap mental untuk menghargai orang lain dalam kehidupannya.

3.3 Urgensi *Peace Education*

Pendidikan perdamaian dalam masyarakat yang beragam dan tingkat pluralitasnya yang sangat tinggi adalah sebuah kebutuhan dan keniscayaan. Hal ini disebabkan karena keragaman-keragaman yang ada seperti agama, organisasi sosial keagamaan, budaya lokal, madzhab/paham, suku, ras, bahasa dan lainnya sering kali memicu konflik dan kekerasan yang merugikan semua pihak. Dalam upaya meredam dan mengantisipasi munculnya sikap fanatisme yang berlebihan terhadap beberapa aspek tersebut dan sebagai upaya preventif terhadap munculnya konflik diperlukan

upaya penyadaran *(consiousness)*. Dalam hal ini pendidikan perdamaian merupakan suatu pilihan yang tepat. Pendidikan perdamaian tidak hanya mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan, menanamkan nilai-nilai toleransi, sikap saling menghargai (*mutual respect)*,memelihara saling pengertian (*mutual understanding)*, keterbukaan dalam keragaman etnik, kultural dan agama. Akan tetapi juga mengajarkan bagaimana kekerasan dan konflik bisa terjadi dan menginformasikan bagaimana menjaga perdamaian, menciptakan perdamaian—jika konflik dna kekerasan telah terjadi, dan membangun perdamaian.

Selamabeberapa dekade bangunan kerukunan umat beragama di Indonesia dibingkai di bawah falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Dengan slogan Trilogi Kerukunan Umat Beragama berupa "kerukunan intra umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah". Trilogi kerukunan tersebut dibingkai secara ketat dan birokratik bersifat represif. Sehingga segala tindakan yang mengarah pada sentimen SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) harus dijauhkan dan bila perlu dimusnahkan. Kekuasaan negara mempunyai power sangat kuat dan sentral dalam menjalankan prinsip homogenisasi sampai pada tingkat masyarakat lokal, yang hampir-hampir tidak melibatkan dan seolah-olah tidak "membutuhkan" peran tokoh lokal. Dalam konsisi semacam ini sesungguhnya masyarakat sangat tertekan dan rawan terjadi konflik dan kekerasan. Hal ini terbukti ketika kekuatan atau power pemerintah melemah maka konflik, kerusuhan dan kekerasan dengan sangat mudah terjadi dan menjalar dimana-mana.[1] Seharusnya pluralitas dan heterogenitas yang dimiliki bukan untuk samakan, akan tetapi dihormati, difahami dan dilestarikan dalam semangat kebangsaan dan kenegaraan (*pluyrality on unity)*.

Upaya yang mengarah ke hal tersebut adalah mewujudkan perdamaian dengan memahami berbagai keragaman ada serta kesadaran

---

[1] Hal ini bisa disaksikan pada tahun-tahun akhir kekuasaan orde baru, antara tahun 1996-1998 banyak terjadi konflik, kekerasan bernuansa SARA.

bahwa keanekaragaman tersebut sangat berpotensi terhadap konflik dan kekerasan. Upaya mewujudkan perdamaian dapat dilakukan dengan pendidikan perdamaian *(peace education).*

Pendidikan perdamaian tidak harus dilaksanakan dalam pendidikan formal, akan tetapi dapat berupa berbagai bentuk dan aktrifitas sosial kemasyarakatan. Dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat atau Lembaga-Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang secara aktif-partisipatif melibatkan dan mengikutsertakan berbagai komponen masyarakat dari berbagai latar belakang.

Alasan utama akan pentingnya pendidikan perdamaian *(peace education)* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah *pertama,* realitas bangsa yang sangat plural, *kedua* pengaruh kebudayaan terhadap kebudayaan lain, *ketiga,* terjadinyabenturan antar budaya dan peradaban *(the clash of culture and civilization)* dan *keempat*efektivitas belajar tentang perbedaan, pentingnya perdamaian dan cara mewujudkan perdamaian.

3.4 *Peace Education* dan Deradikalisasi Umat Beragama

Pendidikan perdamaian *(peace education)* dapat menjadi strategi dalam rangka proses deradikalisasi umat beragama. Sebab dalam pendidikan perdamaian memberikan pandangan, wawasan dan keterbukaan terkait dengan realitas pluralitas umat manusia baik dari segi agama, budaya, ras, bahasa, dan lain-lain. Keragaman yang ada bukanlah hal yang harus ditolak, akan tetapi dikelola, disyukuri sebagai kekayaan dan potensi yang memberikan berkah kehidupan umat. Oleh karena itu, aspek-aspek yang dikembangkan dan diajarkan dalam *peace education* adalah kedamaian dan anti kekerasan (*peace and non-violence*), hak asasi manusia (*human rights*), demokrasi (*democracy*), toleransi (*tolerance*), pemahaman antar bangsa dan antar budaya (*international and intercultural understanding*), serta pemahaman perbedaan budaya dan bahasa (*cultural and linguistic diversity*).

Pluralisme agama dalam kehidupan merupakan keniscayaan. Sejak awal manusia mengalami apa yang disebut sebagai pluralisme agama. Ini disebabkan karena keberagaman wahyu Tuhan dan penerimaan serta ekspresi manusia terhadap wakyu tersebu. Lebih lanjut, wahyu Tuhan diterima manusia dalam akar budaya yang berbeda-beda.

Pluralisme secara sederhana dapat diartikan sebagai keberagaman atau kemajmukan. Kamus Oxford mengartikan pluralisme sebagai *"Principle that these different groups can live together peacefully in one society".* (prinsip bahwa perbedaan-perbedaan ras, anutan politik dan agama bisa hidup bersama secara damai dalam satu masyarakat) (Hornby, 1989: 953). Sedangakan pluralisme agama tidak semata-mata sebagai fakta tentang keragaman agama dan segala perbedaan-perbedaannya, akan tetapi berkaitan erat dengan asumsi-asumsi, anggapan-anggapan dan penilaian dari suatu agama tertentu terhadap keberadaan agama lain. Hal inilah yang membentuk sikap sesorang beragama dalam memandang agama lain. (Abidin, 2002: 4). Dengan kata lain bahwa dalam kehidupan beragama, pluralisme agama merefleksikan suatu bentuk hubungan diantara agama-agama sekaligus dengan perbedaan-perbedaan dan persaingan untuk menyatakan diri agar "diakui" sebagai yang paling benar. Persaingan untuk "diakui" sebagai yang paling benar inilah yang memunculkan klaim kebenaran *(truth claim)* yang menganggap bahwa agama yang dianutnyalah satu-satunya yang paling benar, dan menegasikan kebenaran agama lain.

Pemahaman dan pandangan seperti inilah yang menjadi pemicu dan sangat berpotensi terjadi kerusuhan dan konflik antar umat beragama. Tindakan-tindakan radikal atas nama agama sangat mungkin terjadi dalam situasi dan kondisi semacam ini. Oleh karena itu, melalui *peace education* yang mengajarkan tentang realitas keragaman (pluralisme) agama, ras, suku, budaya, dan bahasa yang harus dikelola dan dihormati akan dapat menjauhkan dari sikap dan tindakan-tindakan ekstrim dan radikal. Lebih-

lebih mengatasnakaman agama. Hal ini berarti pendidikan perdamaian *(peace education)* dapat menjadi proses deradikalisasi umat beragama.

Selain hal itu, *peace education* juga memberikan pemahaman dan penyadaran tentang pentingnya sikap "toleransi aktif" dalam kehidupan umat yang sangat beragam. Sikap "toleransi aktif" dalam konteks ini bukan berarti hanya sekedar membiarkan orang lain ada, tetapi juga bagaimana mengembangkan kebersamaan dan saling pengertian. Dengan begitu maka toleransi menjadi sarana minimal atau modal dasar bagi terwujudnya hubungan antar umat beragama yang saling menghormati dan menyadari. Dengan hal ini, secara otomatis sikap-sikap radikal yang mengarah kepada konflik umat beragama satu terhadap umat agama lain dapat dieliminir, dan hal ini berarti proses deradikalisasi telah menemukan hasilnya.

BAB IV

PEACE EDUCATION DAN UPAYA DERADIKALISASI UMAT BERAGAMA DI FPUB

4.1 Peran FPUB dalam Upaya Deradikalisasi Agama

Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) sebagai sebuah forum kultural yang *concern* terhadap persoalan-persoalan kerukunan antarumat beriman bukanlah satu-satunya di Yogyakarta. Terdapat beberapa lembaga lain seperti DIAN/Interfidei *(Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia)* yang juga mempunyai visi dan misi yang relatif sama. Selain itu juga terdapat FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Sekilas memang antara FPUB dan FKUB nampak sama, akan tetapi terdapat perbedaan. Dari proses berdirinya pun berbeda, FPUB berdiri berdasarkan kegelisahan bersama para tokoh agama dan masyarakat atas berberbagi persoalan keberagamaan dan kebangsaan yang terjadi, sehingga secara kultural mereka berkumpul dan membentuk forum bernama FPUB. Sedangkan FKUB berdiri berdasarkan ketentuan PBM (Peraturan Bersama Menteri). FKUB dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Dari berbagai lembaga atau forum yang ada di Yogyakarta, mereka saling bersinergi dan mendukung guna tercapainya kehidupan umat beriman yang damai, saling menghormati dan penuh toleransi.

FPUB dalam usaha mewujudkan visinya *"terwujudnya komunitas antariman yang penuh kedamaian dengan penghayatan/ keyakinan yang kuat kepada Tuhan dalam nilai kemanusiaan, solidaritas, dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia"* dilaksnakan dalam berbagai program kegiatan yaitu; diskusi dan dialog antar umat beragama, aksi solidaritas sosial, dan aksi damai dan do'a bersama.

4.1.1 Diskusi dan dialog antar umat beragama

Diskusi dan dialog antar umat beragama yang dilakukan oleh FPUB merupakan gerakan kultural yang berusaha menyelami, memahami, dan menumbuhkan saling pengertian terhadap persoalan-persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat. Diskusi dan dialog ini bukan dalam pengertian sempit yaitu sebuah forum berdebat, berargumentasi dan mengungkapkan, mendengar dan menerima pendapat pihak lain. Akan tetapi lebih dari itu, diskusi dan dialog yang dilakukan adalah melampaui hal-hal tersebut. Dalam pengertian bukan lagi mendiskusikan dan mendialogkan wacana, akan tetapi tindakan nyata yang dikemas dalam gerakan kultural. KH. Abdul Muhaimin menyebut diskusi atau dialog FPUB dengan dialog "kehidupan". Banyak kita kenal dialog; dialog hidup, dialog karya, dialog sosial, dialog wacana, dialog tindakan *(dialogue of actio),* dialog pertukaran teologis *(doalogue of teological exchange),* dialog pengalaman keagaman *(dialogue of religious experience),* dan lain-lain, akan tetapi dialog dilakukan oleh FPUB adalah dialog kehidupan.[1]

Latar belakang FPUB yang dibidani oleh berbagai macam tokoh dengan berbagai variasi pengalaman dan latar belakang menjadikan FPUB semakin dinamis. Mereka tidak hanya mendirikan, akan tetapi secara aktif ikut terlibat dan memikirkan untuk mewujudkan visi FPUB. Masing-masing tokoh tetap menjalankan fungsinya sebagai pemimpin masyarakat atau umatnya. Dari aktifitas dan fungsinya sebagai tokoh di komunitasnya masing-masing itulah kemudian muncul kreatifitas dan berbagai permasalahan yang menjadi bahan untuk berdialog. Kebutuhan untuk menanggapi berbagai masalah di masyarakat tersebut menjadi tempat belajar dan sekaligus sebagai praktik lapangan diskusi dan dialog.

Fokus dialog terhadap persoalan-persoalan riil kehidupan masyarakat ini bukan berati menafikan pendekatan dialog lain seperti; dialog teologis atau dokmatis. Dialog yang menyentuh persoalan dokmatis atau teologis

---

[1] Wawancara 14 Juli 2011

lebih bersifat informatif. Sebab menurut Muhaimin, dialog teologis membutuhkan kapasitas tertentu yang tidak bisa begitu saja dilakukan oleh setiap orang, lebih-lebih bagi yang masih mempunyai "fanatisme negatif" (saya benar, kamu salah) justru berdampak tidak bagus dan kontraproduktif. Dialog kehidupan bersifat universal dan secara riil dihadapi oleh semua orang dari berbagai latar belakang agama dan keyakinan, sehingga sangat efektif dalam mewujudkan misi perdamaian *(peace)* dan soalidaritas antarumat beriman.

FPUB menyadari bahwa persoalan antarumat beragama berupa konflik, kekerasan, dan disharmoni yang sering kali terjadi di tengah masyarakat tidak banyak disebabkan oleh perdebatan teologis yang rumit, melainkan hanya semacam menggumpalnya kecurigaan akibat kurangnya saling tegur sapa kultural di antara mereka[2]. Oleh karena itu, dialog antarumat beragama *(interfaith)* menurut FPUB perlu dikembangkan untuk menciptakan kebersamaan dan saling pengertian, bukan sekedar menciptakan kerukunan atau *peaceful co-existence*—hidup berdampingan secara damai tetapi tidak saling mengerti, akan tetapi lebih dari itu yaitu *pro-eksistensi*—tidak hanya berhenti pada membiarkan orang lain ada, tetapi juga ikut serta meng-"ada"-kan secara aktif.

Abdul Muhaimin[3] mengungkapkan bahwa gerakan dialog antaragama yang dibangun dan dikembangkan oleh FPUB selama ini lebih pada memberi stimulus terhadap elemen-elemen dasar pembentuk persaudaraan untuk berkembang menuju kerukunan hidup antar umat beragama yang sehat dan manusiawi. Walaupun masalah kerukunan hidup antar umat beragama itu sangat berkaitan dengan dialog antaragama, namun FPUB tidak menjadikannya sebagai sasaran langsung dari tiap-tiap kegiatan yang diselenggarakan. Sebab kerukunan dan perdamaian *(peace)* umat akan terjadi dengan sendirinya, karena merupakan dampak atau konsekuensi dari dialog yang transformatif-dialektik. Dialog transformatif-dialektik berusaha

---

[2] SULUH FPUB, Edisi Agustus-September, Th. II, 2003, hlm. 6
[3] Wawancara KH. Abdul Muhaimin, 14 Juli 2011

memupuk kebersamaan hidup dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan keumatan dalam konteks kekiniaan sesuai dengan tuntutan zaman.

Dialog antar umat beragama yang dilakukan oleh FPUB juga dalam rangka melakukan transformasi kesadaran beragama, dari kesadaran keberagamaan yang eksklusif ke kesadaran keberagamaan yang inklusif bahkan pluralis. Kesadaran keberagamaan yang ekslusif menganggap bentuk keberagamaannya saja lah yang paling benar dan satu-satunya jalan kebenaran, sehingga menutup ruang kebenaran yang dimiliki oleh penganut lain. Dengan kata lain "hanya agama dan keyakinan saya lah satu-satunya yang benar dan agama dan keakinan orang lain salah". Pola ekslusifisme ini lah yang acapkali menjadi sumbu-pemicu konflik, kekerasan, dan disharmoni antar umat beragama sehingga perdamaian tidak terwujud. Dengan dialog aktif-partisipatif yang diakukan FPUB dapat menjadi media transformasi kesadaran keberagamaan dari nalar ekslusifisme menuju inklusifisme bahkan pluralis. Kesadaran inklusif memahami dan menyadari bahwa terdapat jalan dan ruang kebenaran lain selain keyakinan yang dimilikinya, sebab banyak jalan dan kebenaran dalam ber-Tuhan. Dengan demikian bukanlah hanya agama dan keyakinannya lah satu-satunya jalan kebenaran menuju Tuhan, akan tetapi agama dan keyakinan lain juga mempunyai ruang kebenaran yang sama.

Agama pada dasarnya tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya *(hablum mina Allah),* tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan alam semesta *(hablum mina an Nas wa 'alam)*. Hubungan ini bukan hanya sekedar untuk menciptakan relasi timbal balik yang harmonis tetapi juga memberi kesadaran tanggung jawab. Tanggung jawab manusia kepada Tuhan dan tanggung jawab manusia kepada sesamanya.

FPUB dan kiprahnya dalam membangun dialog antarumat beragama di masyarakat bawah (*grass root)* diharapkan dapat menjadi model atau

acuan bagi daerah-daerah lain. Sebab, bagaimanapun juga gerakan kultural dialog antar umat beragama harus selalu dikembangkan dan dibudayakan mulai dari *grass root* dengan semangat solidaritas dan persaudaraan sejati.

Peran FPUB sebagai faslitator dialog berusaha menciptakan iklim yang dialogis dimana terjalin komunikasi dan kesediaan untuk mendengar, menghormati dan terbuka serta mencari titik temu mengenai hal-hal yang menjadi keprihatinan bersama. Pada titik inilah FPUB berpandangan bahwa agama-agama pada dasarnya memiliki dimensi partikularistik dan dimensi universalistik. Dalam dimensi universalistik inilah dialog antaragama menemukan titik temunya. Dialog antaragama tidak bertujuan menghapus perbedaan yang ada tetapi menciptakan suasana yang kondusif bagi hubungan yang lebih jujur, terbuka dan kritis. Di sisi lain gagasan-gagasan keimanan yang telah didialogkan dapat merangsang dan menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan demi kedamaian dan kesejahteraan masyarakat secara umum.[4]

Dialog antaragama dimaksudkan untuk belajar akan kebenaran-kebenaran yang diperoleh orang lain, sehingga dapat memperkaya kehidupan spiritual kita sendiri yang dalam istilah John S Dunne disebut dengan "*passing over*" dari satu agama dan jalan hidup kepada agama lain yang mungkin sangat berbeda dengan agama kita sendiri. Tetapi kemudian kita kembali *(come over*) memperkaya dengan pengetahuan, pandangan-pandangan baru, bukan hanya mengadopsi pandangan agama lain melainkan memperluas kepunyaan kita sendiri (Mustaqim, 2001: 20).

Pemahaman dialog semacam ini harus menimbulkan perubahan diri bagi pesertanya tanpa jatuh ke dalam reduksionisme dan eksklusifisme, akan tetapi mengembang ke inklusifisme dan pluralisme. Jadi dialog merupakan sarana yang dijadikan oleh umat beriman untuk dapat hidup berdampingan dalam suasana yang damai dan saling pengertian atas dasar kemanusiaan

---

[4] Wawancara Hakim Syah dengan Timothius Apriyanto 7 Maret 2004 dalam Hakim Syah, *Membangun Komunikasi Antaragama; Kajian atas FPUB D.I. Yogyakarta.* Penelitian Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

dan cinta sejati. Dengan demikian, dialog antar umat beragama tersebut akan berdampak pada deradikalisasi sikap keberagamaan dan perdamaian pun dengan sendirinya terwujud.

4.1.2 Aksi Solidaritas Sosial

Aksi solidaritas sosial yang dilakukan oleh FPUB berkaitan dengan keprihatinan atas situasi politik, sosial, ekonomi, budaya dan juga keprihatinan segala bentuk bencana yang terjadi. Nilai pengikat aksi solidaritas sosial ini adalah nilai kemanusiaan. Dalam aksi solidaritas sosial ditekankan pentingnya nilai kemanusiaan yang diperjuangkan oleh semua agama. Dengan kesadaran akan nilai kemanusiaan maka tidak ada anggapan bahwa bentuk atau aksi-aksi sosial yang dilakukan FPUB sebagimana yang banyak diprasangkakan orang; bahwa bentuk-bentuk bantuan merupakan semacam promosi agama tertentu. Sehingga tidak ada istilah "beras kristen", "indomi kristen", "uang kristen" dan lain-lain, sebab barang komuditas tidak beragama. Semua didasari oleh nilai kemanusiaan yang diperjuangkan oleh semua agama.[5]

Agama diturunkan pada dasarnya adalah mengemban misi kemanusiaan. Karena itu, dalam setiap komunitas (atau masyarakat) pasti terdapat ajaran atau keyakinan yang diagung-agungkan sebagai pagar moral penganutnya. Meski dalam pengejawantahannya memiliki perbedaan, namun jika diteliti lebih lanjut, setiap agama selalu memunculkan nilai-nilai normatif yang mendukung kemanusiaan sebagai patron yang tidak boleh tidak, harus ada. Dalam kobteks ini, Imam al-Syathibi merumuskannya dengan "bersumber dari Tuhan tapi diperuntukkan bagi manusia" (*Ilâhiyah al-masdhar wa insâniyyah al-maudhû'*). Rumusan ini mengandaikan bahwa pola keberagamaan yang ideal adalah terjadinya pergulatan antara pemenuhan kepentingan Tuhan

---

[5] KH. Abdul Muhaimin, 10 Agustus 2011

dan manusia. Ini juga berarti bahwa pelaksanaan ritual-formal-individual agama harus bersinergi dengan upaya pembelaan atas nilai-nilai kemanusiaan.

Usaha mewujudkan misi kemanusiaan agama FPUB berbagai kegiatan solidaritas sosial, tidak sekedar diskusi wacana, FPUB juga bergerak di bidang kepedulian, kemanusiaan, ekologi, dan advokasi. Sebuah bukti nyata adalah mengadakan pelatihan berbagai ketrampilan *(skills)* bagi anak-anak korban Tsunami Aceh. Mereka dbawa ke Yogya dengan pesawat, melatih mereka dengan berbagai ketrampilan dan kemudian mengembalikannya. Dengan berbekal ketrampilan tersebut diharapkan dapat mengembangkan dan memberdayakan lingkungannya. Selain itu FPUB mengadakan gerakan menanam pohon di pelbagai tempat dalam kerja sama dengan WALHI dan Budha Tsu Tsi, kegiatan kemanusiaan di lereng G. Merapi dan di daerah gempa di pelbagai tempat di DIY dan Jawa Tengah.

Kemudian FPUB mengajak masyarakat untuk memahami paham-paham kegamaan dalam rangka membangun pemahaman yang luas dan toleransi, misalnya pada bulan puasa FPUB mengapresiasikan makna puasa di berbagai tempat, puasa menurut agama-agama dan aliran kepercayaan. FPUB juga bergerak dengan mengadakan penyuluhan bahaya narkotika, AIDS, dan lain-lain. Hal ini dilakukan dalam rangka usaha mewujudkan masyarakat yang toleran, dan perdamaian atas dasar persaudaraan sejati.

4.1.3 Aksi Damai dan Do'a Bersama

Doa bersama lintas iman menjadi ciri khas FPUB dalam berbagai kegiatan dan aksi. Doa bersama lintas iman memang mendapat perhatian cukup FPUB. Hampir dalam setiap kegiatan dan aksi-aksi sosial yang melibatkan berbagai pemeluk agama bisa dipastikan terdapat agenda doa bersama.

Kegiatan doa bersama yang dilakukan FPUB tidak selamanya dipandang positif oleh berbagai kalangan. Bahkan tidak sedikit doa bersama ini dipandang sebagai penyimpangan terhadap ajaran agama. Oleh karenanya, tidak heran jika pemeluk agama tertentu menentang keras kegitan doa bersama ini.

Secara teknis dalam ritual doa bersama ini para hadirin secara bersama-sama di dalam suatu tempat/acara/kegiatan melakukan doa bersama dengan dipimpin oleh para tokoh agama masing-masing. Para tokoh agama tersebut secara bergantian (maju) meminpin doa sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan dikuti atau diamini oleh peserta yang seagama pemimpin do'a—tetapi juga bayak dari pemeluk agama lain yang ikut juga mengamini do'a. Kalimat-kalimat atau isi do'a (mantra do'a) menggunakan bahasa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Secara umum doa bersama lintas iman memohon kepada Tuhan untuyk memberikan anugerah-anugerah terbaik kepada umat manusia, mengampuni segala dosa, menjauhkan dari malapetaka, krisis, kekerasan dan segala musibah, menyatukan umat dengan rahmatNya, menjadikan masyarakat atau umat beriman di Yogyakarta khususnya, Indonesia Umumnya masyarakat atau negara yang damai, saling mengasihi, persatuan dan kesatuan yang kokoh, makmur, dan santausa di bawah lindunganNya *(baldatun toyibatun warobbun ghafur),* memohon kebaikan di dunia dan akherat, dan lain-lain.

Berbagai aksi yang dilakukan oleh FPUB adalah aksi damai, anti anarkisme dan anti kekerasan. Do'a bersama merupakan salah satu bentuk dari aksi damai tersebut. Dengan aksi damai dan doa bersama terbukti lebih efektif dalam rangka menyampaikan keperihatinan terkait dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara.

Aksi damai dan do'a bersama merupakan salah satu bentuk dari pendidikan dan pembelajaran perdamaian *(peace education and learning)* kepada umat bahwa segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan dan

atas dalih apapun tidak akan pernah menyelesaikan masalah, bahkan justru akan menumbuhkan masalah-masalah baru.[6]

Bukti paling nyata bahwa FPUB dengan berbagai aksi damainya mampu menjadi perekat semua kelompok yang ada di Yogyakarta, yang menginginkan suasana menjadi lebih baik adalah pada Gerakan Perdamaian Masyarakat Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 1998. Yakni jutaan anggota masyarakat berkumpul di alun-alun utara untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah agar diwujudkan suatu perubahan/reformasi total. Dalam peristiwa itu yang paling mengharukan adalah dengan kesadaran sendiri masyarakat menyediakan makanan dan minuman di pinggir-pinggir jalan untuk mereka yang berbondong-bondong menuju ke alun-alun utara Yogyakarta. Peran Sultan Hamengku Buwana X menjadi symbol pemersatu yang kharismatis sungguh nyata. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa meskipun sebelumnya banyak terjadi kekerasan, sejak saat itu tidak ada lagi perlakuan semena-mena dari pihak aparat terhadap mahasiswa.[7] Hal ini membuktikan bahwa aksi damai dan doa bersama mampu mengguggah keasadaran masyarakat akan pentingnya kebersamaan, persatuan, kesatuan dan kerukunan.

Kegiatan doa bersama memang mendapat banyak sorotan dari tokoh-tokoh agama lain, mereka menilai FPUB telah mencampuradukkan ajaran agama-agama dan telah membentuk agama baru. Menanggapi hal ini pendiri FPUB Rm. Suyatno Hadiatmaja menegaskan bahwa *"FPUB bukan organisasi singkretis, para anggota FPUB tidak ingin membentuk agama baru, melainkan sebuah komunitas yang para anggotanya saling belajar memahami dan menghormati satu sama lain".*[8] Totok Baroto dengan nada yang sama menegaskan:

---

[6] Wawancara Ngatiyar, 14 Juli 2011

[7] Y. Suyatno Hadiatmaja Pr , *Forum Persaudaraan Umat Beriman; Organesasi Tanpa Bentuk Yang Membentuk,* Makalah untuk memperingati sepuluh tahun FPUB. Hal 3

[8] http://www.indomedia.com/bernas/9901/23/UTAMA/23uta3.htm. download 6 Agustus 2011

Sebetulnya tidak seperti itu, kita fokusnya bagaimana kita meminta kepada Yang Mahakuasa itu untuk bangsa dan negara. Tidak ada lain di FPUB ini. Itulah yang kita doakan. Mencampuradkukan agama itu tidak ada, wong kita in berdoa bagi negara dan kita. Karena kita ini berdo'a untuk bangsa dan negara kita untuk perekatan agar bangsa kita tercabik-cabik.[9]

Kegiatan-kegiatan FPUB sendiri mendapatkan sambutan positif dari masyarakat nasional khususnya Yogyakarta, FPUB tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, ia hanya lembaga sosial-lintas iman yang megemban visi *"terwujudnya komunitas antariman yang penuh kedamaian dengan penghayatan/ keyakinan yang kuat kepada Tuhan dalam nilai kemanusiaan, solidaritas, dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia".* Sikap anti kekerasan, mencintai perdamaian, dan persudaraan semakin meresap dihati masyarakat.

4.2 Bentuk-Bentuk *Peace Education* FPUB

Peace education pada dasarnya adalah sebuah proses untuk mendapatkan pengetahuan, pengembangan sikap, dan tingkah laku untuk dapat hidup saling menghormati, toleran, penuh perdamaian, saling membantu dan anti kekerasan *(non-violence).*

Berbagai bentuk kegiatan FPUB dalam peranya menciptakan perdamaian dan anti kekerasan melalui proses non-formal pendidikan perdamaian *(peace education)* sebagaimana yang dirumuskan UNESCO dalam *International Year for the Culture of Peace* tahun 2001 sampai 2010 sebagai dekade budaya damai dan tanpa kekerasan (*International Decade for a Culture of Peace and Non-Violence for the Children of the World*). Dalam hal itu dirumuskan enam aspek yang harus dikembangkan pada program *peace education* yaitu; kedamaian dan anti kekerasan (*peace and non-violence*), hak asasi manusia (*human rights*), demokrasi (*democracy*), toleransi (*tolerance*),

---

[9] Wawancara dengan Pak Toto Bronto, dalam Albertus Nugroho w., hal 45

MILIK PERPUSTAKAAN

pemahaman antar bangsa dan antar budaya (*international and intercultural understanding*), serta pemahaman perbedaan budaya dan bahasa (*cultural and linguistic diversity*).

4.2.1 Kedamaian dan anti kekerasan (*peace and non-violence*)

Kedamaian dan anti kekerasan (*peace and non-violence*) merupakan aspek penting dalam mewujudkan harmoni, toleransi, dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat yang sangat beragam. Kedamaian dan anti kekerasan menyadarkan peserta terhadap pentingnya penyelesaian setiap masalah dan perbedaan dengan dialog dan menghindari segala bentuk kekerasan. Tindakan kekerasan apapun dan atas nama apapun tidak akan pernah apat menyelesaikan masalah, bahkan akan terus menimbulkan masalah-masalah baru.

FPUB dengan berbagai kegiatannya didasarkan pada prinsip mewujudkan perdamaian dan antikekerasan. Bagi FPUB kedamaian difahami sebagai bentuk persaudaraan yang saling memahami, menghormati dan cinta kasih. Semua agama dengan kitab sucinya mengajarkan untuk menghargai kemerdekaan semua orang. Hal ini dilandasi oleh cinta kasih. Kata salam dalam ajaran agama-agama *"assalamualaikum", "salom", "santi", "rahay",* bukanlah kata basa-basi, kata tersebut sesungguhnya menunjukkan komitmen umat beriman untuk mewujudkan damai sejahtera. Jika hal tersebut disadari oleh semua masyarakat atau umat beriman bahwa kata salam adalah umum dan universal—bukan terkotak-kota ini salamku, itu salammu, maka tidak harus dijawab—maka akan tercipta perdamaian dan cinta kasih sejati.

Prinsip dalam cinta kasih adalah tidak membeda-bedakan, bahkan orang yang memusuhi sekalipun harus dibalas dengan cinta kasih. Jika hal ini terlaksana maka akan terwujud kedamaian. Damai bukan berarti bebas dari konflik, akan tetapi dengan konflik yang ada dapat diselesaikan dengan

semangat cinta kasih. Pendeta Bambang Subagyo memberikan penjelasan sebagai berikut:

> *"Konsepnya sebenarnya damai dan sejahtera. Damai itu suatu bentuk persaudaraan yang saling menghormati. Dalam kitab suci dikatakan orang menghargai kemerdekaan orang lain dan menghargai semua orang, landasannya cinta kasih. Cinta kasih itu tidak membeda-bedakan. Bahkan orang yang memusuhi sekalipun harus dibalas dengan cinta kasih, barulah terwujud kedamaian. Damai itu bukan berarti tidak ada konflik. Damai itu bagaimana mengatasi konflik dengan semangat cinta kasih".*[10]

Konsep kedamaian mencakup fisik dan non-fisik, internal dan eksternal, Kedamaina internal dapat dibangun dengan kualitas iman, pemenuhan sisi HAM dan budaya. Sedangkan anti kekerasan merupakan turunan dari damai akibat dari perdamaian maka yang mewujud adalah perilaku yang tidak mengundang kekerasan, apalagi melakukan kekerasan. Kyai Abdul Muhaimin memberikan penjelasan sebagai berikut:

> *"Anti kekerasan itu derivasi dari damai di dalam, kemudian yang mencul aktualisasinya dia melakukan sesuatu yang tidak mengundang kekerasan dan melakukan kekerasan. Kalau dia tidak menggunakan kekerasan tapi sikapnya mengundang kekerasan, ya sama saja".* [11]

Kegiatan FPUB dalam rangka mewujudkan perdamaian dan anti kekerasan secara formal adalah dialog antarumat beriman. Dialog ini merupakan sebuah usaha preventif untuk menjaga dan menghindari tindak kekerasan. Berbagai aksi kekerasan, konflik, anarkisme dan radikalisasi atas nama agama yang terjadi selama ini lebih banyak dipicu oleh tidak saling mengerti, prasangka *(prejudice),* dan kurangnya bertemu-berinteraksi.

---

[10] Wawancara Pendeta Bambang Subagyo, tanggal 10 Agustus 2011
[11] Wawancara dengan KH. Abdul Muhaimin, tanggal 10 Agustus 2011

Dialog ini bukan dalam pengertian formal yaitu sebuah forum berdebat, berargumentasi dan mengungkapkan, mendengar dan menerima pendapat pihak lain, akan tetapi merupakan gerakan kultural yang berusaha menyelami, memahami, dan menumbuhkan saling pengertian terhadap persoalan-persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat.

Upaya lain yang dilakukan FPUB dalam mewujudkan perdamaian antar umat beriman yang telah terjadi ketegangan atau konflik adalah melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi dimaksudkan untuk merajut kembali persahabatan, persekawanan dan persaudaraan atas dasar cinta kasih dan iman. Rekonsiliasi bukan berarti melupakan kejadian masa lalu, akan tetapi saling menerima dan memaafkan, mengakui kekurangan, kehilafan, dan kesalasan masing-masing. Tidak melupakan kejadian masa lalu sebagai pelajaran agar tidak terulang dikemudian hari. Dalam bahasa lain adalah *forgive but not forgotten (memaafkan, akan tetapi tidak melupakan).*

Upaya membudayakan perdamaian, kerukunan umat beriman—termasuk pula penghayat kepercayaan—dan mengikis radikalisme (deradikalisasi) atas nama agama FPUB setidaknya melakukan tiga strategi gerakan yaitu; *pertama* FPUB melakukan konsolidasi diantara lembaga dan para aktvis *interfaith.* Hal ini dilakukan dalam rangka memantapkan dan mengembangkan forum lintas iman. Hal ini dilakukan dengan mengadakan berbagai pertemuan dengan berbgai aktivis lintas iman. Mereka melakukan refleksi dan evaluasi terhadap berbagai fenomena, kejadian dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Forum. Refleksiddan evaluasi ini menjadi penting sebagai alat ukur perjalanan, perkembangan dan keberhasilan dialog antariman yang dilakukan, sehingga kekurangan dan kelemahan bisa segera diminimalisir untuk kegiatan-kegiatan berikutnya.

Kedua, FPUB melakukan integrasi dan membangun jaringan dengan lembaga-lembaga lain yang mempunyai visi sama untuk meningkatkan kualitas dialog antariman. Jaringan yang telah dibangun FPUB tidak hanya di DIY, atau tingkat nasional saja, akan tetapi hingga tingkat internasional.

Dinatara jejeraing FPUB dalam rangka membangun dan mengembangkan dialog antariman adalah Komite Kemanusiaan Yogyakarta (KKY), LKiS, DIAN/ Interfidei, INTI, PAMTRA, Bhakti Putera dan pelbagai kelompok *interfaith* di daerah-daerah lain seperti MADIA Jakarta, FORMALIN Semarang, PUBM Magelang, GEMARI (Generasi Muda Antar-Iman) Jakarta dan lain-lain. Sedangkan kerjasama dengan luar negeri FPUB telah berjejaring dengan CCFD *(Comite Catholique Contre La Faim Et Pour Le Developpement)* Prancis. Lembaga ini merupakan mitra kerja FPUB dalam membangun gerakan dialog antar agama, bahkan selama ini CCFD telah berperan sebagai *supporting system* dari kegiatan-kegiatan FPUB.[12]

Ketiga, FPUB menjalin hubungan dialog antariman dengan masyarakat basis (*grass root community).* Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendalami persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian aktifitas dialog yang dilakukan tidak jauh dengan persoalan yang dialami dan dihadapi masyarakat. Metode yang digunakan dalam rangka menjalin hubungan ini adalah partisipatoris, yaitu ikut terlibat secara langsung segala aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, pendekatan sosial-budaya menjadi hal yang sangat penting mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural-multkutural dan sangat menghargai lokalitas dan budaya.[13]

4.2.2 Hak Asasi Manusia (*human rights*)

Hak Asasi Manusia (*human rights*) mengajarkan penghormatan terhadap kebebasan seseorang yang merupakan haknya yang diberikan Tuhan kepada manusia. HAM secara normatif dimengerti sebagai hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tercantum dalam

---

[12] Wawancara dengan Romo Suyatno Hadiatmaja, tanggal 10 Agustus 2011
[13] Wawancara dengan Ngatiyar, tanggal 14 Juli 2011

UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.

Bagi FPUB pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai peran penting dalam membangun masyarakat damai dan toleran. Lebih-lebih menyangkut tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam konteks ini penghormatan terhadap HAM dapat difahami sebagai tujuan dari ketentuan peraturan atau dalam bahasa lain adalah *"maqosidus Syari'ah"*. KH. Abdul Muhaimin memberikan penjelasannya sebaga berikut.

> *"HAM adalah hak memilih, hak dihormati, dan saya kira seperti maqosidus syari'ah. Pada sisi teologis, Allah telah memberikan area HAM yang sagat luar biasa, "faman syaa fal yukmin faman syaa falyakfur". Akan tetapi dalam kehidupan sosial, kebebasan itu harus bertanggung jawab, kebebasan bukan kebebasan yang mutlak, secara teologis kebebasan itu mutlak tapi secara sosiologis kebebasan dibatasi oleh HAM orang lain".*[14]

Aktifitas atau segala kegiatan yang dilakukan oleh FPUB berlandaskan kepada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Bagi FPUB HAM merupakan penghargaan tertinggi atas fitra Allah dalam diri manusia. HAM dihormati karena merupakan tuntutan kodrati, dalam agama Katholik atau Kristiani mengatakan bahwa "manusia itu adalah citra Allah". Citra Allah artinya foto copy, atau mirip dengan Allah. Semua manusia mempunyai citra yang sama yaitu *"citra dalem gusti"*, oleh kerena manusia merupakan makhluk yang paling luhur yang sederajat dan sama. Jika melawan hal tersebut, berarti melawan sang pencipta.

Menentukan keberagamaan, keyakinan, dan keberimanannya adalah hak paling asasi yang dimiliki oleh manusia. Atas dasar itulah FPUB selalu menghargai semua manusia yang beriman dan berkeyakinan. Dalam hal ini Pendeta Bambang Subagyo memberikan kesaksiannya sebagai berikut:

---

[14] Wawancara KH. Abdul Muhaimin, tanggal 10 Agustus 2011

"Sebagai hak asasi manusia yang paling asasi adalah menentukan imannya, maka mansia tidak boleh memaksa, untuk beriman ini atau beriman itu. Oleh karena itu kita harus menghargai semua orang beriman dalam agama apaun dan benar-benar muncul dari spiritualitasnya yang plural atau multikultural. Spiritualitas multikultur berartinya bagaimana orang menghayati perbedaan bukan agar tidak rusuh tapi berdasarkan spiritualitas bahwa Tuhan itu menciptakan keanekaragaman, dalam keanekaragam itu orang saling menghormati dan menghargai. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak orang yang eksklusif dalam beragama".[15]

Program-program FPUB terkait dengan penyadaran dan pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) untuk kebebasan beragama dan berkeayakinan *(religion belief and Human right)* adalah mengadakan diskusi, dialog, pelatihan dan pewartaan melalui penerbitah majalah SULUH.

SULUH adalah majalah dwibahasa yang diterbitkan oleh FPUB setiap tiga bulan. Penerbitan Majalah SULUH dimaksudkan untuk menebarkan perdamaian yang dilandasi oleh semangat dialog antariman *(interfaith dialogue).* Munculnya majalah SULUH diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan wawasan dan informasi pluraslime-multikultur, toleransi dan Hak Asasi Manusia dalam bentuk media.

Wujud nyata usaha menampilkan informasi yang menghargai kebebasan beragama atas dasar HAM dan toleransi, FPUB melalui SULUH mengadakan pelatihan jurnalistik antariman. Latar belakang pentingya dilaksanakan diklat atau pelatihan jurnalistik antariman ini adalah keberadaan FPUB yang merupakan bagian dari gerakan sosial yang tumbuh dan berkembang di Yogyakarta berusaha terus menerus berusaha mewujudkan pendidikan multikultur, persaudaraan antariman, meneguhkan spirit kemanusiaan dan kebangsaan serta mendorong spiritualitas multikultur sebagai landasan gerakan sosial baru.

Melalui pendidikan multikultur dan perdamaian *(peace and multiculture education)* dijadikan sebagai proses perjuangan masyarakat untuk meraih

---

[15] Wawancara dengan Pendeta Bambang Subagyo, tanggal 10 Agustus 2011

keadilan, hak beragama dan berkeyakinan tanpa adanya penindasan dan kekerasan atas dasar apapun. Atas dasar itulah, FPUB melalui majalah SULUH sebagai bagian dari devisi media dan informasi memainkan peran yang sangat penting. Sebagai majalah antar iman, Suluh bergerak menyebarkan virus-virus persaudaraan dan perdamaian di ranah publik dengan menyuguhkan jurnalisme yang berbasis keragaman, baik etnis, budaya, dan antariman. Selain hal itu, SULUH juga memiliki tanggungjawab pengkaderan generasi muda yang memiliki kepedulian memperjuangkan perdamaian dan persaudaraan sejati.

Oleh karena itu FPUB merlalui devisi Media dan Informasi (SULUH) mengadakan pelatihan jurnalistik antariman bagi para generasi muda. Kegiatan pendidikan jurnalistik ini diharapkan mampu menjadi proses diseminasi ide, visi dan kreatifitas bagi generasi muda yang konsens pada isu perdamaian, persaudaraan, kebangsaan dan multikultural, terlebih pada ranah jurnalistik antariman. Secara lebih spesifik Moh Ikrom selaku Pemimpin Umum Majalah SULUH mengutarakan maksud dan tujuan dilaksanakan pelatihan jurnalstik antariman.

> *"Pelatihan jurnalistik antariman ini setidaknya mempunyai dua maksud yaitu; pertama, pengenalan wawasan jurnalistik dan jurnalisme interfaith sebagai suatu gerakan media yang menyuarakan kehidupan kumunitas-komunitas yang didasari semangat perdamaian dan persaudaraan sejati yang nir-kekerasan. Kedua internalisasi visi misi jurnalisme interfaith sebagai interfaith media movement untuk ikut aktif menyebarluaskan informasi, wacana dan kesadaran interfaith dalam semangat perdamaian dan persaudaraan dan sekaligus wahana pendidikan bagi publik. Sedangkan tujuannya adalah adalah pertama, terbantuknya kader kuminitas interfaith yang mampu hidup secara multikultural dan multiiman dalam bingkai kehidupan yang damai dan penuh persaudaraan. Kedua independensi moral kader muda dalam kehidupan masyarakat terkait kemajemukan iman, ras, suku dan golongan demi untuk menyebarluaskan wacana perdamaian dan persaudaraan yang sejati"*[16]

---

[16] Keterangan Moh Ihrom, tanggal 16 Juli 2011. Pelatihan Jurnalistik antariman FPUB dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 22-24 Juli 2011 di Balai Budaya Somohitan Turi Sleman Yogyakarta.

Pelatihan jurnalistik antariman yang melalui SULUH diharapkan menjadi wahana para generasi muda untuk menumbuhkembangkan potensi jurnalistik dan jurnalisme *interfaith* dalam semangat perdamaian dan persaudaraan sejati. Selain itu, dapat berpartisipasi aktif dalam menyuarakan nilai dan prinsip jurnalisme *interfaith* di Indonesia.

Pada pelatihan jurnalistik antariman diikuti oleh perwakilan dari lembaga dan organisasi kepemudaan lintas iman sebanyak 30 peserta (seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha Konghucu) dan Penghayat Kepercayaan (seperti Sapto Darmo, Kawulo Yogyakarta dan Sunda Wiwitan). Selain itu, peserta pelatihan juga berasal dari delegasi beberapa mitra jaringan gerakan sosial-keagamaan di Yogyakarta, seperti Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), Jama'at Ahmadiyah Indonesia (JAI), Komunitas Perempuan Sadar (KPS), Kordiska UIN, KODAMA, PMII, HMI, KMHD, Kamadhis UGM, Mudika, Warta Desa dan San't egidio.

4.2.3 Demokrasi (*Democracy*)

Demokrasi (*democracy*) mengajarkan terhadap kebersamaan dan kesamaan hak dan kuwajiban dalam kehidupan berbangsas dan bernegara. Dimana semua warga negara dewasa turut berpatisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Pemerintah di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga Negara, menegakkan *rule of law,* adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Pemehaman terhadap demokrasi memberikan manfaat tentang kesetaraan dan kesamaan sebagai warga negara, memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Umum, pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar, dan pembaruan kehidupan sosial.

FPUB memandang demokrasi sebagai pilar dalam menciptakan tata negera yang berkeadilan, menghargai hak, dan pemenuhan terhadap

kewajiban baik dari pemerintah maupun warga negera. Pemahaman terhadap demokrasi sangat berhubungan erat dengan penghormatan dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Semakin tinggi tingkat pemehaman warga negera terhadap demokrasi, maka penghargaan terhadap perbedaan agama sangat tinggi. Oleh kerena itu dalam menciptakan masyarakat yang demokrasi setidaknya harus ditopang oleh tiga pilar yaitu; *pertama,* negara kuat. *Kedua,* penegakan hukum, dan *ketiga,* kultur demokrasi. Abdul Muhaimin memberikan penjelasannya terkait dengan demokrasi.

> *"Demokrasi sangat erat hubungannya dengan kebebasan agama, Negara yang tingkat demokrasinya tinggi akan sangat menghargai perbedaan agama dan keyakinan, sebaliknya negera yang kesadaran berdemokrasinya rendah akan rendah pula penghargaan terhadap perbedaan beragama dan berkeyakinan.... demokrasi harus ditunjang tiga pilar. Pertama, negara kuat, artinya mampu menjawab aspirasi masyarakat atau hadir dengan kebijakan tepat, kedua, ditopang hukum yang tegak, ketiga, kultur demokrasi, demokrasi jangan hanya sebagai prosedur, demokrasi itu siap berunding, siap ngalak, awak dewek nek kalah ngamuk nek menang umuk".*[17]

Usaha FPUB dalam membangun masyarakat demokratis, menghormati perbedaan agama dan keyakinan, dan mencintai pedamaian dan menjauhi kekerasan dilakukan dengan berbagai. Sebagai contoh adalah FPUB memfasilitasi konfik ahmadiyah yang sedang diserang, ikut mengamankan natal, atau perayaan agama-agama. Proses pendidikan juga dilakukan dengan cara menggadakan perayaan hari-hari besar keagamaan bersama dengan tujuan agar orang saling faham, saling mengeti dan saling memahami. Semua itu dilakukan dalam rangka membangun masyarakat yang damai, toleran, dan anti kekerasan.

---

[17] Wawncara Abdul Muhaimin, tanggal 10 Agustus 2011

4.2.4 Toleransi *(Tolerance)*

Toleransi, *tolerance* (Inggris:); *tasamuh* (Arab) berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Secara etimologis, toleransi adalah kesabaran, ketahanan emosional, dan kelapangan dada. Sedangkan secara terminologis toleransi berarti bersifat atau bersikap menenggang—menghargai, membiarkan, membolehkan—pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya.[18] Jadi toleransi beragama secara sederhana dapat diartikan sebagai sikap sabar dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama-agama lain, atau membangun sikap untuk saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan lainnya.

Pemahaman terhadap toleransi sangat penting dalam usaha membangun masyarakat yang damai, dan penuh kasih, lebih-lebih masyarakat yang multikultural. Dalam masyarakat multikultur seperti Indonesia gerakan dialog antaragama harus ditopangkan oleh toleransi kultural, yakni tata laku kehidupan. Ia bukan semata-mata didasarkan pada toleransi antarkeberimanan, namun seyogyanya dibingkai dalam toleransi antarkemanusiaa. Bukan hanya toleransi dalam pengertian pasif, akan tetapi toleransi aktif yaitu kesediaan untuk secara aktif menghormati, mengakui dan secara partisipatif membagun perdamaian.

Program FPUB selalu diorientasikan pada pembentukan dan membangun sikap toleransi aktif antar umatberiman dan antarbudaya *(cross culture).* Dalam hal ini FPUB memandang bahwa pentingnya sebuah cara pandang multikultural. Cara pandang multikultural mengandaikan adanya kesepakatan bahwa di dalam masyarakat terhampar begitu banyak keragaman kultural, yang masing-masing entitasnya berdiri sendiri dan saling berinteraksi. Distribusi kultural yang berlangsung dari entitas yang beragam itu tidak saling menghabisi antarsesamanya, namun justru saling

---

[18] Binsar A. Hutabarat, *Kebebasan Beragama VS Toleransi Beragama,* www.google.com

memperkaya dan mewarnai. Artinya, dalam interaksi berbagai suku dan agama (keyakinan) yang ada dalam sebuah masyarakat tidak dipungkiri adanya pertukaran, komunikasi dan bahkan gesekan. Yang menjadi catatan adalah, perspektif ini menolak konstruksi ideologi dominan yang disebut "melting pot" [19].

Dalam konteks masyarakat multikultur semacam ini maka gerakan dialog antaragama musti ditopangkan pada toleransi kultural, yakni tata laku kehidupan yang bukan semata-mata didasarkan pada toleransi antarkeberimanan, namun dibingkai dalam toleransi antarkemanusiaan[20]. Sebab sebenarnya media budaya yang menampung varian agama itu telah sama-sama dipraktekkan dan dijalani dalam lakon kehidupan sosial. Oleh karena itu, gerakan *interfaith* (dialog antar agama) musti dirancang sebagai gerakan kultural yang mengakar di level masyarakat. Gerakan yang hadir oleh dan dari masyarakat. Ia harus mengakar dan tumbuh berkembang di dalam masyarakat.

4.2.5 Pemahaman antar bangsa dan antar budaya (*international and intercultural understanding*)

Pemahaman antar bangsa dan antar budaya (*international and intercultural understanding*) memberikan penyadaran bahwa pada setiap bangsa atau daerah mempunyai kekhasannya masing-masing. Bahkan seringkali saling bertolak belakang. Di satu budaya sikap tertentu dapat diterima, namun dalam budaya yang lain tidak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap lintas bangsa dan budaya akan menghantarkan kepada toleransi lintas budaya sehingga perbedaan itu tidak mengakibatkan persoalan atau kesalahpahaman. Dalam banyak kasus, konflik budaya mudah ditemui di berbagai tempat pertemuan multi budaya. Dengan pemahaman ini konflik-konflik tersebut dapat tereliminir.

---

[19] SULUH, Edisi Agustus-September, Th.II, 2003, hlm. 3
[20] Wawancara KH. Abdul Muhaimin, tanggal 14 Juli 2011

FPUB selalu mengintegrasikan kegiatan penyadaran akan pentingnya keragaman dengan tradisi dan budaya setempat *(local culture).* Penghargaan terhadap lokalitas dengan pendekatan mulikultural. Sebab pemahan terhadap keberagamaan dan toleransi masyarakat sedikit-banyak dipengaruhi oleh sosio-kulturalnya.

Oleh karena itu Pemahaman antar bangsa dan antar budaya (*international and intercultural understanding*) sangat penting dalam mewujudkan kerukunan, perdamaian dan persaudaraan sejati antarumat beriman.

4.2.6 Pemahaman perbedaan budaya dan bahasa (*cultural and linguistic diversity*)

Pemahaman perbedaan budaya dan bahasa (*cultural and linguistic diversity*) menghantarkan kepada kesadaran akan keanekaragaman budaya dan bahasa serta dialek. Keragaman budaya dan bahasa tersebut satu sisi merupakan kekayaan yang sangat berharga, akan tetapi di sisi lain dapat berpotensi sebagai pemicu konflik dan disharmoni. Sehingga pemahaman terhadap perbedaan budaya dan bahasa (*cultural and linguistic diversity*) dimaksudkan untuk menyadari keragaman dan dikelola sebagai kekayaan dan rahmat.

Dalam konteks ini FPUB melalui SULUH menampilkan berbagai rubik yang digali dari beraneka ragam budaya dan latar. SULUH memformat berita dan informasinya dalam bentuk rubrik. Rubrik di majalah SULUH meliputi tajuk, topk, wacana, bahasa, sosok, geliat, khasanah, pendapat, resensi, jeda dan refleksi. Rubrik-rubrik dalam majalah SULUH ini berusaha menyampaikan pesan-pesan khas FPUB yaitu toleransi, pluralisme, multikulturaslime, demokrasi, anti kekerasan, perdamaian, komunikasi antarumar beriman, dan hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Rubrik-rubrk SULUH ditulis dengan gaya penulisan yang sederhana seperti feature atau bercerita.

Berbagai tema dan berita yang dimuat dalam majalah SULUH merupakan kampanye perdamaian. Rubrik sosok menampilkan kolom profle yang berisi perjalanan seseorang dan profile sebuah kota. Melalui rubrik sosok majalah SULUH ingin memberikan berbagai fakta-fakta tentang kiprah dan perjalanan seseorang yang mengabdikan diri untuk aktualisasi iman.

Rubrik Geliat mewartakan informasi dna aktivitas semangat umat beriman dalam melakukan berbagai aksi sosial. Rubrik ini seakan-akan memberikan fakta dan pelajaran bahwa perbedaan agama dan kehyakinan bukan alasan untuk tidak saling bekerjasama dan berbuat yang bermanfaat untuk kermanusiaan. Dengan perbedaan justru menjadi media untuk menjalin persaudaraan sejati dan saling memberikan mafaat bagi sesama mahluk Tuhan.

Rubrik Khasanah mengulas tentang kekhasan dan kekayaan budaya nusantara yang dapat menjadi contoh dan tauladan bagi terciptanya perdamaian, toleransi dan persaudaraan sejati.

Rubrik Dinamika berisi tentang berbagai warta atau kabar-kabar terkait dengan berbagai aktivitas yang dilakukan FPUB dalam rangka menyemaikan perdamaian, pluraslime dan persaudaraan sejati seperti aktivitas do'a bersama lintas iman, kenduri kebudayaan, multikulturaslime dan lain-lain.

Rubrik Dinamika berisi resensi buku tentang agama dan keberagamaan. Akhir dari rubrik Dunamika adalah kolom refleksi yang berisi tentang ulasan reflektif fenomena keberagamaan, sosial, dan budaya yang terjadi.

Berbagai tulisan dan berita yang dibagi dalam berbagai rubrik dalam majalah SULUH dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap perbedaan budaya dan bahasa (*cultural and linguistic diversity*) yang harus disyukuri, dibina dan menjadikannya sebagai jalan untuk menjalin persaudaraan sejati.

4.3 Kendala *Peace Education* dan Deradikalisasi Umat Beragama

Usaha membangun dan mengembangkan perdamaian melalui berbagai program kegiatan pendidikan perdamaian *(peace education)* yang dilakukan oleh FPUB bukan tanpa kendala. Pendidikan perdamaian melalui berbagai gerakan kultural yang dilakukan FPUB menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut setidaknya dapat dipetakan dalam empat hal yaitu; *pertama* kendala teologis, yaitu kecenderungan memahami agama dengan pemahaman keagamaan yang eksklusif dan kaku sehingga menutup ruang dialog aktif-konstruktif dalam memahami keberagamaan yang ada. Agama masih dipahami secara normatif yang terpisahkan dari sosial-budaya pemeluknya. Pemahaman semacam ini lah yang masih difahami oleh sebagian besar masyarakat sehingga usaha deradikalisasi umat beragama masih sulit dilakukan. Pemahaman keagamaan yang eksklusif kaku tersebut juga berakibat kepada sulitnya membangun dialog antariman. Sebab dialog dapat berjalan dengan baik manakala inklusifitas nalar keagamaan umat terbentuk, sehingga dengan begitu pemeluk agama tidak akan ragu dalam melakukan interaksi dan kerjasama antarumat beragama untuk melahirkan karya yang baik dalam semangat kebersamaan dan persaudaraan.

Kedua, kendala psikis (ketegangan batin) yaitu masih adanya perasaan khawatir terhadap pemeluk agama lain ketika melakukan interaksi, dialog atau kerjasama. Seperti kekhawatiran akan terseret ke dalam keyakinan agama lain, dicap kafir, mencampur-adukan agama dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena keberagamaan dan keimanan kita selama ini kurang mendapatkan kebebasan berekspresi dan aktualisasi.

Ketiga, adanya prasangka (*prejudice)* di kalangan pemeluk agama terhadap gerakan dialog antaragama. Prasangka bahwa dialog antar agama merupakan suatu upaya sinkretisasi atau mencampur-adukan agama dan bahkan menciptakan "agama baru". Prasangka-prasangka tersebut berakibat pada rasa curiga terhadap aktivitas gerakan dialog antaragama.

Ketiga, kendala kepentingan *(interest)* yaitu adanya kepentingan atau aganda tersebunyi *(hidden agenda)* yang dimiliki dalam melakukan dialog antarumat. Kepentingan *(Interest)* tersembunyi yang dibawa dalam membangun gerakan kultural antarumat beriman menyebabkan gerakan yang dibangun tidak dapat berjalan secara jujur dan terbuka. Dialog antaragama hanya menjadi ajang pertarungan kepentingan atasnama agama, dan hal ini kontraproduktif dengan semangat dialog yang mengedepankan kejujuran, keterbukaan, dan perdamaian.

BAB V
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 SIMPULAN

1. FPUB dalam usaha mewujudkan persaudaraan sejati antarumat beriman yang dilandasi dengan sikap toleransi-aktif, kejujuran, penghargaan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan *(freedom of religion and belief)* secara garis besar dilaksanakan dalam tiga program kegiatan yaitu; diskusi dan dialog antar umat beragama, aksi solidaritas sosial, dan aksi damai dan do'a bersama. Ketiga hal ini merupakan bentuk dari pendidikan perdamaian *(peace education)* dalam usaha deradikalisasi agama. *Pertama,* diskusi dan dialog antar umat beragama merupakan gerakan kultural yang berusaha menyelami, memahami, dan menumbuhkan saling pengertian terhadap persoalan-persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat. *Kedua,* aksi solidaritas sosial yang dilakukan oleh FPUB berkaitan dengan keprihatinan atas situasi politik, sosial, ekonomi, budaya dan juga keprihatinan segala bentuk bencana yang terjadi, dan *ketiga* aksi damai dan do'a bersama merupakan salah satu bentuk dari pendidikan dan pembelajaran perdamaian *(peace education and learning)* kepada umat bahwa segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan dan atas dalih apapun tidak akan pernah menyelesaikan masalah, bahkan justru akan menumbuhkan masalah-masalah baru.
2. Bentuk kegiatan FPUB dalam peranya menciptakan perdamaian dan anti kekerasan melalui proses non-formal pendidikan perdamaian *(peace education)* mencakup enam aspek yaitu; kedamaian dan anti kekerasan (*peace and non-violence*), hak asasi manusia (*human rights*), demokrasi (*democracy*), toleransi (*tolerance*), pemahaman antar bangsa dan antar budaya (*international and intercultural*

understanding), serta pemahaman perbedaan budaya dan bahasa (*cultural and linguistic diversity*).

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka menciptakan perdamaian *(peace education)* dan proses deradikalisasi agama adalah; *pertama* kendala teologis, yaitu kecenderungan memahami agama dengan pemahaman keagamaan yang eksklusif dan kaku sehingga menutup ruang dialog aktif-konstruktif dalam memahami keberagamaan yang ada. *Kedua,* kendala psikis (ketegangan batin) yaitu masih adanya perasaan khawatir terhadap pemeluk agama lain ketika melakukan interaksi, dialog atau kerjasama. *Ketiga,* adanya prasangka (*prejudice)* di kalangan pemeluk agama terhadap gerakan dialog antaragama. *Keempat,* kendala kepentingan *(interest)* yaitu adanya kepentingan atau aganda tersebunyi *(hidden agenda)* yang dimiliki dalam melakukan dialog antarumat.

5.2 REKOMENDASI

1. Dialog dan kerjasama yang berintegrasi dengan kegiatan sosial-budaya yang melibatkan berbagai agama dan keyakinan terbukti menjadi sarana efektif dalam membentuk dan mengembangkan persaudaraan sejati atas dasar cinta kasih dan kemanusiaan. Peran aktif dan dialog kultural yang dilakukan dengan sendirinya dapat mentransformasikan kesadaran ekslusif ke kesadaran iklusif-pluralis, sehingga dengan proses ini deradikalsasi umat beragama telah terjadi.
2. Sinergitas, koordinasi, dan kerjasama antarlembaga, baik lembaga sosial-kemasyarakatan maupun pemerintah sangat dibutuhkan dalam membangun budaya damai dan anti kekerasan. Dengan demikian setiap lembaga tidak saling meng-*claim,* dan merasa paling besar kontribusi dan pengaruhnya yang justru kontraproduktif terhadap penciptaan perdamaian. Dalam konteks Daerah Istimewa

Yogyakarta keberadaan lembaga atau forum lintasiman yang dibentuk atas prakarsa masyarakat (non-pemerintah) telah berjalan secara efektif jauh sebelum adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bentukan pemerintah. Oleh karenanya—untuk kasus DIY—FKUB sesungguhnya sudah dapat terwakili oleh lembaga-lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar Metrid, *Urgensi Pendidikan Perdamaian di Aceh.* http://www. Adetinstitute Akbar-2505007- urgensi -pendididkan- di-aceh.

Albertus Nugroho Widiyono, *Kerukunan Antarumat Beragama; Sebuah Studi Kasus Melihat Visi Dialog FPUB Yogyakarta dalam Perbandingan dengan Visi Dialog Korelasional Paul F. Knitter.* Tesis, Yogyakarta: PPs Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2009

Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1998

As. Hornby, *Oxford advanced learner's dictionary*, Oxford: Oxford University Press, 1989

Asghar Ali Engineer, *On Developing Theology of Peace in Islam"*, alih bahasa oleh Rizqon Khamami, *Liberalisasi Teologi Islam (Membangun Teologi Damai Dalam Islam),* Yogyakarta: Alenia, 2004

Binsar A. Hutabarat, *Kebebasan Beragama VS Toleransi Beragama, makalah tidak diterbitkan*

Bogdan, Robert & Taylor, Steven J. *Pengantar Metoda Penelitian kualitatif (suatu pendekatan Fenomologis terhadap ilmu-ilmu sosial),* (Surabaya: Usaha Nasional 1992)

Chirul Mahfud, *Mengembangkan Model Pendidikan Perdamaian.* Makalah tidak dipublikasikan.

Choirul Mahfudz, *Pendidikan Multikultural,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Fattah hanurawan dan Peter Weterwoth, "Multicultural Perspectives in indonesian social studies education Curriculum", *jurnal ilmu pendidikan,* vol 4, edisi special 1998

Gary T. Furlong. *The Conflict Resolution Toolbox.* John Wiley & Sons Canada, Ltd. 2005

George Ritzer, *Teori Sosial Postmodern,* (terj. Muhammad Taufik), Yogyakarta: Juxtapose Research and Publication Study Club dan Kreasi Wacana, 2005

Ghadir Khum, *Landasan Filosofis Pendidikan Damai, makalah tidak diterbitkan*

H. A. R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidika,* Magelang: IndonesiaTera, 2003

H. A. R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional,* Jakarta: Grasindo, 2004

Hakim Syah, *Membangun Komunikasi Antaragama; Kajian atas FPUB D.I. Yogyakarta.* Penelitian Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

http://www.indomedia.com/bernas/9901/23/UTAMA/23uta3.htm. download 6 Agustus 2011

Http://www.Indonesia.com.

Josep J. Darmawan, (ed.), *Multikulturalisme Membangun Harmoni Masyarakat Plural,* Yogyakarta: Universitas atma Jaya Yogyakarta, 2005

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung,* PT Remaja Rosdakarya, 1996

M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan* .Yogyakarta: Pilar Media, 2005

Miles, Matthew b. & A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI Press. 1992

Rahayu, Iin Tri dan Ardani, Tristiadi. *Observasi dan Wawancara*, Malang: Banyumedia, 2004

Ricardo L. Garcia, *Teaching in Pluralistic society*, Harper & Row Plubisher: New York

Salim, Agus, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006

Sholehuddin A. Aziz. *Penguatan Peace Building Melalui Sosialisasi Perdamaian & Community Empowerment* (artikel).

Stephen Baron et.al. *Social Capital. critical Perspectives.* Oxford University Press Inc. New York. 2000

SULUH (suplemen) edisi 19 Tahun V Januari-Februari 2005

SULUH, Edisi Agustus-September, 2003

SULUH, Edisi Juni-Agustus, 2001

www.fpub.or.id.

Y. Suyatno Hadiatmaja Pr, *Forum Persaudaraan Umat Beriman; Organesasi Tanpa Bentuk Yang Membentuk*, Makalah untuk memperingati sepuluh tahun FPUB

Zaenal Abidin,"*Teologi (Islam) Pluralis Dalam Masyarakat Multi Religius*", Religia,Vol.2, No.1, 2002

Zakiyuddin Baidhawy, *Pendidikan Agama berwawasan Multikultural*, Jakarta, Erlangga, 2005

Zamroni. (2008). *Peace Education. A Reader.* Artikel tidak dipublikasikan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

(Dokumentasi dan Foto-Foto)

BUDAYA MASYARAKAT

Madya Ratri Langkah Spiritual untuk Perbaiki Bangsa

"Ana kidung rumeksa ing wengi/teguh hayu luputa ing lara/luputa bilahi kabeh..." (Ada lagu berjaga di waktu malam, yang menjadikan kuat sekemat dan terbebas dari semua penyakit, terbebas dari semua petaka....)

OLEH DEFRI WERDIONO

Sepenggal syair dandanggala berjudul *Ana Kidung Rumeksa ing Wengi* karya Susunan Kalijaga ini dikutip oleh Sultan Hamengku Buwono X. Dalam sambutan yang dibacakan Gusti Bendara Pangeran Haryo (GBPH) Joyokusumo ini, Sultan mengajak prosesi *langkah madya ratri* "Neges Laku Budaya Mrih Maruanggaling Bangsa" secara simbolik. Iaksana mantra tolak bala.

Demikianlah, semua manusia diharapkan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, selingga terhindar dari segala kerusakan dan malapetaka, bunyinya yang terkandung dalam bait-bait *Ana Kidung Rumeksa ing Wengi*.

Selasa (19/5) malam, menjelang Hari Kebangkitan Nasional ke-101, ratusan masyarakat dari berbagai kesatuan dan komunitas melakukan prosesi berjalan kaki dari utara *ringin kurung* Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta hingga Tugu. Ditemani obor menyala tanah, mereka melantunkan doa di dalam hati masing-masing.

Masyarakat yang tergabung dalam Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) Yogyakarta dan Komite Kemanusiaan Yogyakarta mengikuti kegiatan "Neges Laku Budaya Mrih Maruanggaling Bangsa" dari Alun-alun Utara menuju Tugu Yogyakarta, Rabu (20/5). Laku spiritual dan budaya yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tersebut adalah satu bentuk keprihatinan atas semakin merosotnya kualitas moral dan budaya Bangsa Indonesia, serta mengembalikan semangat kebersamaan untuk menjaga keselamatan dan keutuhan bangsa.

Selama perjalanan, mereka sempat berhenti beberapa kali, antara lain di depan Pasar Beringharjo dan kantor Gubernur DIY. Pasar dianggap simbol kedunia wan, selama berhenti pelaku ritual merefleksikan diri apakah selama ini terlalu berorientasi pada materi semata. Begitu pula kantor pemerintahan sebagai simbol kekuasaan.

Tugu Golong Gilig dimaknai sebagai simbol bersatunya pemimpin dengan rakyat atau biasa disebut *manunggaling kawula gusti*. Sementara itu, *ringin kurung* dan Alun-alun Utara adalah simbol "laku" atau keprihatinan rakyat yang berasal dari pengaruh kekuasaan dan motivasi material.

Secara filosofis, proses berjalan kaki dari keraton ke tugu dimaknai oleh masyarakat Jawa sebagai momentum transendental imanen atau simbol titik pencerahan dalam puncak

(Bersambung ke hal D kol 1-2)

Meramu Persaudaraan dalam Bingkai Kebinekaan

(Sambungan dari halaman I)

iman juga membangun komunitas sejenis. FPUB lalu menginspirasi forum-forum lain dengan impian serupa di 15 kota di Indonesia. Di Nanggroe Aceh Darussalam namanya Forum Aceh Kemang; di Magelang, Jawa Tengah (Jateng), Persaudaraan Umat Beriman; dan di Klaten (Jateng) Forum Kerukunan Umat Beragama. Seterusnya terbentuk pula wadah serupa di Purworejo dan Temanggung (keduanya di Jateng) serta Pulau Bali.

Di tempat kelahirannya, komunitas yang mendialogkan kebinekaan telah bersemi di 73 desa di Yogyakarta. Sabtu (25/10), forum itu bersyawalan lintas iman di Kabupaten Bantul.

Lahir dan berkembangnya FPUB tak lepas dari prakarsa tokoh pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Ummahat, Kotagede, Yogyakarta, KH Abdul Muhaimin. Kala itu, Muhaimin berembuk bersama pimpinan agama dan kepercayaan dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, maupun Sapta Dharma di pesantrennya.

Figur lain yang ikut mendorong lahirnya FPUB adalah pastor Y Suyatno Hadiatmojo Pr. "Keberagaman harus menjadi berkat, bukan ancaman konflik. Kami mengajak bersama-sama mengalami kehidupan spiritual yang sama sebagai anak bangsa," ungkap Suyatno.

Pada era awal pendirian FPUB, baik konflik, kerusuhan, maupun perusakan tempat ibadah, marak terjadi seiring transisi masa pemerintahan kala itu. Awalnya, sebanyak 76 tokoh agama berkumpul di Ponpes Nurul Ummahat mengantisipasi agar kerusuhan tak menjalar ke Yogyakarta.

Tentu saja—menurut Muhaimin maupun Suyatno—awalnya pertemuan diwarnai kecurigaan, ketegangan, dan ketakutan. Persaudaraan tidak serta-merta lahir. Namun, terus "menjadi" saat dirajut waktu. "Ketika sudah saling mengenal, ternyata keberagaman itu indah, nyaman, dan damai. Ketika rasa kekeluargaan semakin kental, kita menjadi tidak mudah terprovokasi oleh kecurigaan," ujar Suyatno.

Tawaran memfasilitasi dialog antariman pun terus mengalir dari seluruh penjuru Tanah Air. Berjuang bagi kebinekaan sesungguhnya tidak mudah. Lontaran sindiran serta tuduhan sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Muhaimin dan Suyatno. Rekan-rekan mereka sering kali menuduh mereka sebagai penganut relativisme, sekuler, bahkan dianggap kafir.

Penghargaan terhadap keberagaman, antara lain, diwujudkan oleh Muhaimin dalam keseharian di ponpes. Tamu yang ingin belajar tentang ponpes biasa berbaur dengan para santri. "Saya menolak jika pergaulan kiai harus dibatasi. Perjuangan bagi kebinekaan akan menjadi enteng jika dilakukan dengan ikhlas," ujar Muhaimin.

Meskipun FPUB lahir tanpa struktur organisasi, Muhaimin selalu didaulat sebagai koordinator. Biasanya panitia *ad hoc* baru dibentuk ketika akan menggelar kegiatan seperti saat menggelar doa bersama demi keselamatan DIY di Makam Pendiri Mataram Panembahan Senopati di Kotagede, Kamis lalu. FPUB pun getol menyalurkan bantuan ke daerah-daerah, wujud program yang langsung menyentuh masyarakat kecil.

Menurut Muhaimin, konflik yang sepertinya mengatasnamakan agama sering kali ditunggangi kepentingan politik, ekonomi, dan subyektivitas individual. Tiap komponen bangsa diharapkan mau memberi ruang yang memadai kepada setiap kelompok tanpa memperhitungkan besar atau kecilnya massa. Perbedaan teologi harus didialogkan supaya tetap memberi kontribusi terhadap negara.

FPUB, menurut Muhaimin, terus berupaya memperjuangkan nasionalisme melalui perspektif agama. Saat bertemu, kecintaan terhadap bangsa, misalnya, diwujudkan dengan menyanyikan *Indonesia Raya*.

Melalui perjuangan kebinekaan, mereka berusaha mengembalikan salah satu sisi nasionalisme Indonesia, warisan Bhinneka Tunggal Ika.

KOMPAS KAMIS, 23 OKTOBER 2008

PERSIAPAN PISOWANAN AGENG

Gelar Doa Bersama bagi Sultan

YOGYAKARTA, KOMPAS — Mendekati Pisowanan Ageng yang hendak diselenggarakan pada hari Selasa (28/10), berbagai kelompok masyarakat melakukan doa untuk Sultan Hamengku Buwono X. Selain itu, mereka berharap agar acara tersebut berlangsung dengan lancar dan aman.

Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) Yogyakarta akan menggelar doa bersama dengan mengelilingi atau *mubeng* makam Panembahan Senopati di Kotagede pada Kamis malam. *Mubeng* makam tersebut terutama untuk mendoakan agar Sultan bisa mengambil keputusan yang jernih dan *wening*, terutama dalam menanggapi aspirasi sebagian masyarakat agar Sultan mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu mendatang.

"Kontemplasi dengan menggunakan laku spiritual ini supaya Sultan lebih memilih menjadi guru bangsa sehingga bisa mengembalikan eksistensi keraton. Kami mendoakan Sultan agar menemukan jati diri keistimewaan sehingga bisa memberi jawaban yang tepat pada forum Pisowanan Ageng," kata Koordinator FPUB KH Abdul Muhaimin.

WKM

KH Abdul Muhaimin

Momentum *mubeng* makam tersebut sekaligus ditujukan untuk ziarah ke makam Panembahan Senopati sebagai pendiri Keraton Mataram. FPUB juga ingin melacak kembali jati diri dan kejayaan Keraton Mataram demi kelangsungan Keraton Yogyakarta. Muhaimin mengutarakan, Keraton Yogyakarta harus mampu terus menjadi pusat budaya dan mendukung terwujudnya Yogyakarta sebagai daerah istimewa, sesuai aspirasi masyarakat.

Makam Imogiri

Tim operasional Pisowanan Ageng juga akan menggelar *panuwunan agung* melalui *mubeng* Makam Raja-raja di Imogiri pada Jumat besok, dimulai sejak tengah hari. "Doa ini untuk memohon agar Pisowanan Ageng aman dan lancar. Sekaligus berdoa bagi Sultan serta keistimewaan Yogyakarta," tutur anggota tim operasional Bondan Nusantara.

Menurut panitia pelaksana, beberapa raja Nusantara direncanakan akan hadir dan menyampaikan aspirasinya dalam forum tersebut. Raja yang akan hadir, antara lain berasal dari Bali, Sumba, dan Minangkabau. Rencananya, forum tersebut juga akan dihadiri oleh beberapa perwakilan partai politik, forum rektor Indonesia, dan budayawan. (WKM)

KOTA YOGYA

"KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 7

SAMBUT HUT KE-63 RI

Berhentilah Mengeluh Membangun Bangsa

YOGYA (KR) - Acara kenduri kebangsaan, Kamis malam (14/8) di Monumen Serangan Umum 1 Maret berlangsung khidmat. Ratusan warga antusias menyambut prosesi kirab tumpeng dengan iringan alunan musik spiritual menggambarkan harmoni kehidupan bangsa. Dalam proses itu, tumpeng diarak oleh pasukan pencoh, punggowo dan ulama.

Acara kenduri kebangsaan ini digelar Forum Rakyat Jogja (FRJ) dalam rangka HUT ke-63 RI bertema *Hamemayu Hayuning Bawana, Hamerti Kincaraning Nagri*. Nuansa budaya terasa sekali dalam gelaran tersebut, yang diduka penampilan kelompok musik spiritual Sarikraman dan Sari Laras. Diusul doa pembuka oleh Haksu Tjhie Tjay Ing.

Romo Yatno dari FPUB mengungkapkan kirab tumpeng ini simbol keanekaragaman bangsa. Bentuk tumpeng yang mengerucut ke atas merupakan simbol persatuan dari aneka warna dan aneka rasa. Ini sebagai salah satu refleksi keragaman budaya di tengah-tengah masyarakat.

"Saya sering prihatin jerih payah para pahlawan untuk merebut kemerdekaan hanya dirukar dengan lomba makan krupuk dan panjat pinang. Kenduri kebangsaan ini merupakan refleksi masyarakat Yogyakarta untuk menyukari nikmat kemerdekaan," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, GBPH Prabekusumo mewakili Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan orasi budaya. Dikatakannya, *hamemayu* meliputi 3 *satya brata* antara lain hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Sang Pencipta. Jika hal ini terwujud akan menjadikan pembangunan lebih humanis.

"Mari kita berhenti untuk mengeluh tapi wujudkan upaya nyata dalam membangun bangsa. Untuk menanamkan nilai-nilai keharmonisan butuh refleksi seperti ini. Dengan strategi kebudayaan kita arahkan untuk menciptakan kehidupan yang bermartabat dan mandiri," kstanya.

Dari perwakilan petani, Mbah Mariyo juga menyampaikan orasinya tentang nasib petani yang belum sejahtera. Sejak dulu hingga kemerdekaan para petani belum menikmati keuntungan. Mereka selalu dihadapkan pada kelangkaan pupuk serta melambungnya biaya operasional pertanian.

Acara kenduri kebangsa juga dimeriahkan musik tradisional Thonghoa yang mukau ratusan masyarak Kenduri kebangsaan ditu dengan pemotongan tump oleh GBPH Prabukusum serahkan kepada mantan juang dan siswa berprest Acara ini dihadiri rato masyarakat dari berbaga men seperti warga le Merapi, paguyuban Tiong santri pondok pesantren masyarakat umum. (R

DISKUSI

Pemasyarakatan Nilai Budaya Atasi Degradasi Moral

YOGYAKARTA, KOMPAS – Kemajuan zaman dan teknologi pada satu sisi mengakibatkan terjadinya degradasi spiritualitas, kepribadian, dan etika pada masyarakat. Untuk mengatasinya, nilai-nilai luhur budaya Jawa perlu dimasyarakatkan kembali sesuai dengan konteks kekinian.

Wacana tersebut mengemuka pada seminar "Nilai Budaya Jawa di Yogyakarta" yang diselenggarakan oleh Dewan Kebudayaan DI Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan DIY, Sabtu (10/3) di Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian Yogyakarta.

Menurut Ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman KH Abdul Muhaimin, yang menjadi salah satu pembicara, degradasi spiritualitas tampak dalam penghargaan seseorang pada apa yang dimilikinya. "Sekarang semuanya dinilai dengan uang. Ketika ada bencana misalnya, korban akan ditanya sudah mendapat bantuan atau belum," kata Muhaimin.

Dari aspek kepribadian atau pandangan hidup, terjadi pula perubahan nilai di masyarakat karena mereka kehilangan hal-hal yang sifatnya reflektif maupun kontemplatif. Degradasi etika semakin dirasakan dalam kehidupan.

Mengatasi degradasi pada ketiga aspek itu, Muhaimin melihat pentingnya melakukan revitalisasi pada tiga sistem, yaitu sistem religi untuk membenahi model keberagamaan yang simbolik dan puritan, sistem kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepribadian bangsa, dan sistem pencaharian yang berhubungan dengan rusaknya etika bisnis.

Revitalisasi

Lebih jauh pemasyarakatan kembali nilai-nilai budaya Jawa diharapkan juga dapat menunjang proses revitalisasi itu. "Penting untuk menemukan kembali nilai-nilai budaya dan mengimplementasikannya dalam konteks masa kini sehingga tidak tergerus modernitas," ungkap Muhaimin.

Budaya *alon-alon waton kelakon*, misalnya, lebih dimaknai oleh generasi muda sebagai kelambatan dan tergeser dengan prinsip siapa cepat dia dapat. Padahal, nilai yang ingin disampaikan lebih pada bagaimana melakukan sesuatu dengan perhitungan matang, tanpa tergesa-gesa.

Untuk memelihara budaya Jawa yang tak hanya fisik tersebut, saat ini Dewan Kesenian DIY tengah mempersiapkan penyusunan materi draf Perda Tata Nilai Budaya Jawa di Yogyakarta. Seperti diungkapkan Ketua Dewan Kebudayaan DIY Yuwono Sri Suwito, reinventarisasi budaya dapat menentukan nilai-nilai budaya mana yang masih relevan, sudah tidak relevan, maupun dapat dibaharui dalam kehidupan masyarakat masa kini. (AB3)

Lahar Dingin Satukan Warga Code

JUMAT LEGI 13 MEI 2011 (9 JUMADILAKIR 1944)

DARYANTO (60) terlihat tegang, meski sudah menyiapkan alternatif tempat jika terjadi hujan. Pemilik rumah dikan bantaran Kalicode yang jaraknya tak lebih dari 5 meter dari lahar sungai, untuk lokasi doa bersama adalah bukan pilihan tanpa risiko. Jika di puncak Merapi turun hujan, bukan tidak mungkin lokasi doa bersama akan terendam air.

"Hujan deras Minggu 8 Mei lalu, lahar dingin sampai halaman masjid, tempat dipanjatkan doa bersama lintas iman. Tapi kami yakin saja tidak turun hujan," kata Daryanto Ketua Panitia Doa Bersama Lintas Iman, yang diselenggarakan Warga Masyarakat Bantaran Kali Code Yogyakarta bekerja sama dengan Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) Yogyakarta, di Bantaran Kali Code Rusun Jogoyudan, Gowongan, Kamis (12/5).

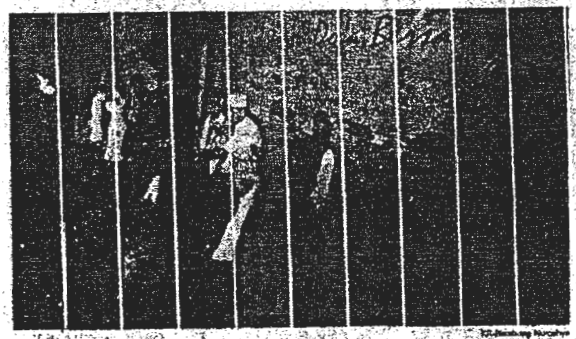

Tribun Jogja/Nugroho

Tokoh agama di DIY memimpin doa bersama lintas iman di bantaran Kali Code, Kamis (12/5) malam.

Untungnya, hingga acara berakhir kekhawatiran Daryanto tidak terjadi. Bahkan acara tersebut dihadiri masyarakat sekitar bantaran Kali Code maupun ratusan relawan dari berbagai komunitas. Jalan menuju lokasi sempat ditutup sementara, sebagai

penerapan. Tedi (41) juga Wakil Walikota Haryadi Suyuti, GKR Pembayun, tokoh-tokoh

* Bersambung hal (k.o) 1

lintas iman, perwakilan sekitar 12 komunitas relawan, Merapi, masyarakat Turgo, Merapi dan lainnya.

Menurut Daryanto, ide doa bersama tersebut sekitar 40 hari sebelumnya. Doa untuk saling menguatkan mental dan spiritual warga di tengah kecemasan dan kekhawatiran kali terjadi banjir lahar dingin.

"Kami menyadari bahwa hujan belum berhenti, sementara di puncak Merapi material yang belum turun masih sangat banyak. Bukan hanya warga, relawan yang akan turun tugas, bekal mental spiritual juga jadi modal batinnya lahar dingin terjadi," jelas Daryanto.

Sebelum doa bersama, juga digelar ritual sang sesaji berupa pelepasan 7 ekor burung berwarna putih ke Kali Code sebagai simbol hilangnya hal-hal yang menyusahkan masyarakat. Juga sebagai harapan bencana yang terjadi ikut mengalir.

Ketua RW 07 Jogoyudan Eko Agus mengatakan adanya lahar dingin sebelumnya ... berikan hikmah berupa kebersamaan yang sangat erat antar masyarakat bantaran Kali Code, Masyarakat dengan relawan serta

tas relawan sendiri. Tercatat ada 12 komunitas yang berhubungan komunikasi erat yang selalu memantau kondisi Kali Code maupun puncak Merapi mulai dari relawan di kawasan Kali Boyong hingga di relawan yang berada di bantaran Kali Code di Kota Yogyakarta.

Menurut Bambang, relawan dari Turgo, Sleman sewaktu ia duduk kaget setelah tahu, Kali Boyong di puncak Merapi ternyata kemudian menyempit menjadi Kali Code yang melintas Kota Yogyakarta. Menyadari bahwa lahar dingin akan mengancam masyarakat di bantaran Kali Code, dengan sukarela bersama rekan-rekannya selalu mengubarkan kondisi di puncak Merapi.

Wawali Haryadi Suyuti mengatakan terdapat ada enam kecamatan, 14 kelurahan dan 66 RW di kawasan bantaran Kali Code. Haryadi memuji kebersamaan warga yang muncul setelah terjadi banjir lahar dingin. Hikmah yang ada adalah pendandaran yang tokoh sebagai pendekat masyarakat. Sedang GKR Pembayun berjanji akan membantu itu recovery ekonomi kawasan bantaran Kali Code.

(Agung P)-a

KOMPAS JUMAT, 22 MEI 2009

Madya Ratri Langkah Spiritual...

(Sambungan dari halaman A)

kesempurnaan hidup. "Sebuah kehidupan yang harmoni dalam hubungan horizontal antara manusia dan manusia maupun hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan," ujar Suwalji, salah seorang panitia proses yang berasal komunitas kawula Yogyakarta.

Secara lebih luas, ritual jalan kaki sambil bisu dimaknai sebagai media untuk menyongsong masa depan bangsa. Sultan mengatakan ritual ini sebagai bentuk ajakan kepada para pemimpin untuk menjadikan diri pusat keteladanan bagi masyarakat dalam menyongsong esok hari yang lebih cerah.

"Dengan *lampah madya ratri* diharapkan seluruh lapisan masyarakat bisa menangkap substansi dan esensi dari semangat golong gilig antara pemimpin dan rakyat untuk bekerja bahu-membahu *saiyek saiko kapti*, menggalang *manunggaling bongso* dalam Indonesia baru yang lebih sejahtera dan berkeadilan," ungkapnya.

Laku budaya dengan berjalan ke utara, lanjut Sultan, juga dimaknai sebagai sarana *walik*, yakni membalik keadaan. Mengubah keprihatinan menjadi kebahagiaan melalui proses pasrah diri dan membangun demi kesejahteraan bangsa yang lebih besar.

Berbagai upaya untuk mengubah keadaan memang harus segera diperlukan. Semakin hari, permasalahan demi permasalahan yang menyangkut berbagai kehidupan terjadi di pelosok negeri yang berujung pada penderitaan baik lahir maupun batin. Perilaku anak bangsa juga kian kecenderungan merosotnya kualitas spiritual, moral, dan etika.

Demokrasi yang dihadapkan menjadi solusi untuk menggapai kesejahteraan bersama justru menjadi alat untuk kepentingan individu atau golongan. Sementara rakyat yang seharusnya memegang kedaulatan, justru menjadi obyek semata.

Oleh karena itulah, Forum Persaudaraan Umat Beriman dan Komite Kemanusiaan Yogyakarta yang terdiri dari berbagai elemen, merasa tergerak untuk mengembalikan semangat dan keutuhan bangsa melalui upaya tulus dan laku spiritual. Semoga niat baik mereka membawa hasil....

KOMPAS, SELASA, 28 OKTOBER 2008

80 TAHUN SUMPAH PEMUDA

Meramu Persaudaraan dalam Bingkai Kebinekaan

Oleh MAWAR KUSUMA WULAN

Forum Persaudaraan Umat Beriman atau FPUB Yogyakarta, yang dideklarasikan 24 Maret 1997, boleh jadi adalah buah dari Sumpah Pemuda, 80 tahun silam. Wadah tanpa struktur organisasi ini ingin menggandeng setiap orang yang berkehendak hidup rukun sebagai saudara di taman kebinekaan Indonesia.

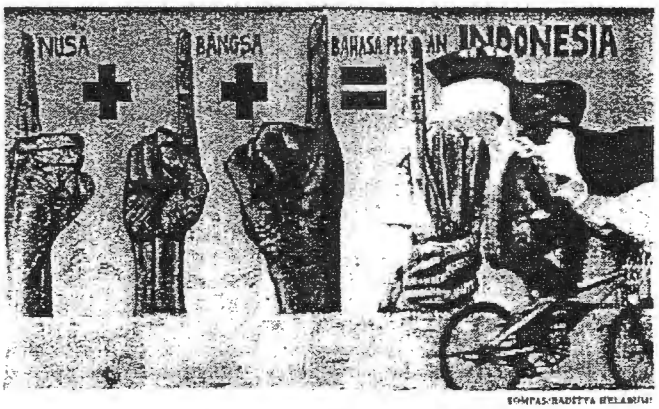

KOMPAS/BADITYA HELABUMI

Pengendara sepeda melintasi mural yang mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan di Jalan Dinoyo Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/10).

FPUB pun selanjutnya ibarat "taman" keberagaman dan di sana tiap perbedaan memperoleh tempat, dirawat dan tumbuh dalam ikatan persaudaraan yang erat tanpa ada sekat.

Pesona FPUB melalui gema nilai kemanusiaan lintas iman pun menyebar ke seantero Nusantara dan secara alamiah menginspirasi para pencinta perdamaian dan persaudaraan

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)

KORAN TEMPO
SELASA, 10 JUNI 2008

Junjung Kebhinekaan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X (tengah) dan pemuka agama menyampaikan pernyataan sikap saat dialog "Forum Rakyat Yogyakarta" di Universitas Gadjah Mada kemarin. Sejumlah elemen masyarakat menolak tindak kekerasan dan menjunjung utuhnya kebhinekaan.

UPACARA NGROWNOU

Simbol Harmoni Manusia dan Alam

Masyarakat Desa Girikerto, Turi, Sleman, memiliki tradisi tahunan yang digelar sebagai wujud syukur atas karunia Tuhan, [illegible] Tradisi yang juga bertujuan menghargai dan melestarikan air itu dikenal sebagai [illegible] pada Minggu (14/2). Salah satu prosesi upacara adat tersebut adalah prosesi prajurit desa.

Tak sekadar upacara

BINA MENTAL PERSONAL DAN SOSIAL

Akbidyo-FPUB Jalin Kemitraan

YOGYA (KR) - Sebagai upaya pembinaan mental personal dan sosial bagi mahasiswa, Akademi Kebidanan Yogyakarta (Akbidyo) bermitra dengan Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB). Program ini untuk melengkapi mata kuliah agama yang hanya diberikan satu semester *berbobot dua SKS*, sekaligus mewujudkan pendidikan berbasis iman dan taqwa.

Penjelasan awal tentang program ini disampaikan Ketua FPUB, KH Abdul Muhaimin, Jumat (19/3) sore, di halaman kampus Akbidyo. Pada acara ini, Abdul Muhaimin didampingi para pemuka agama anggota forum, di antaranya Johanes Suwaldji (Katolik), Wayan Sumerta (Hindu) dan pendeta *Bambang Subagyo* (Kristen).

Direktur Akbidyo Drs Henry Sukirdi, menjelaskan program ini wajib diikuti seluruh mahasiswa, diselenggarakan Jumat sore pada minggu ketiga setiap bulannya. Para pemuka agama datang ke kampus Akbidyo memberi 'siraman rohani' sesuai yang dianut masing-masing mahasiswa. Program dilaksanakan sore hari agar tak mengganggu proses pembelajaran. "Diharapkan dengan program yang dilakukan bersama FPUB, selama kuliah dan setelah lulus mahasiswa tak melanggar norma kesusilaan," harapnya.

Dijelaskan, mata kuliah agama yang diberikan dirasa belum mencukupi, sehingga perlu ada bekal kerohanian tambahan. Meski tak berkaitan dengan akademik, tapi program ini harus diikuti mahasiswa dibuktikan dengan presensi kehadiran. Presensi itu nantinya sebagai bahan pertimbangan yang bersangkutan saat mengajukan beasiswa maupun melaksanakan yudisium. **(Ben)-g**

KR-BENNY KUSUMAWAN

KH Abdul Muhaimin (berdiri) memberi penjelasan pada mahasiswa.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RATMOKO

Forum Persaudaraan Umat Beriman mengadakan doa bersama di kompleks makam Panembahan Senopati, Kotagede, Yogyakarta, Kamis (23/10). Mereka mendoakan agar Sultan dapat berpikir jernih dalam menentukan langkah terkait pencalonan dirinya sebagai capres.

AKSI SIMBOLIK RAKYAT

Berbeda Cara tetapi Bukan Perpecahan

Riak-riak akibat guncangan politik mulai mewarnai kehidupan masyarakat. Keguyuban yang biasanya diusung ketika memperjuangkan roh keistimewaan DIY mulai menunjukkan percabangan.

Oleh MAWAR KUSUMA dan ERWIN EDHI PRASETYA

Ungkapan kegelisahan yang cukup unik dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri Kawula Pendherek Sultan yang disingkat Kapsul. Mereka melakukan kritik sosial terhadap gelaran Pisowanan Ageng yang nantinya akan berisi pidato keputusan Sultan terkait dengan isu calon presiden, dengan menggelar Pisowanan Ijen.

Pisowanan Ijen ini diperankan oleh seorang pria yang mengenakan pakaian adat Jawa lengkap. Pria itu hanya duduk bersila di teras Gedung DPRD DIY pada Jumat (24/10) siang. Dia memakai kacamata hitam dan membawa seekor ayam jago tanpa mengucapkan satu patah kata pun.

Pada saat yang hampir bersamaan, sebagian masyarakat menggelar ritual *mubeng* makam di Kompleks Makam Rajaraja di Imogiri. Dalam keheningan, mereka berdoa supaya Sultan diberi kejernihan hati saat mengambil keputusan politik. *Mubeng* makam ini dihadiri oleh lebih dari 50 orang perwakilan elemen masyarakat yang menjadi tim penyelenggara forum Pisowanan Ageng.

Sekretaris Forum Cinta Budaya Bangsa Widodo yang turut serta dalam ritual *mubeng* makam berharap Pisowanan Ageng yang digelar bersamaan dengan perayaan Sumpah Pemuda itu bisa berjalan lancar. Apa pun keputusan Sultan terkait pencapresan, dia dan rekan-rekannya akan sepenuh hati memberikan dukungan. "Kami berharap kontribusi Sultan di kancah nasional nantinya tidak setengah-setengah," tutur Widodo.

Sehari sebelumnya, Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) juga mencoba membalut kegelisahan dengan menggelar doa lintas agama di makam Panembahan Senopati, Kotagede, pada Kamis malam. Di atmosfer udara yang dipenuhi harum dupa, para pemuka dari berbagai agama dan kepercayaan berdoa secara bergantian dengan cara ibadahnya masing-masing di depan pintu makam.

Bersambung ke hal D kol 1-3

Sambungan dari hal A

"Kami bersikap netral dan independen. Kami tidak punya pretensi untuk menolak atau mendukung pencapresan. Hanya berharap agar Sultan diberi kejernihan hati saat mengambil keputusan pada forum Pisowanan Ageng mendatang," kata Koordinator FPUB KH Muhaimin.

Ketua Kapsul Nanang Sri Roekmadi menuturkan, Pisowanan Ijen merupakan manifestasi kegelisahan suara hati nurani rakyat yang mengalami kesendirian dan kini sedang terpinggirkan. Seorang diri berusaha menghadapi kesalahkaprahan kolektif akibat dari kepentingan-kepentingan politik tertentu.

Pisowanan Ijen adalah bentuk kritik sosial terhadap gelaran Pisowanan Ageng yang dinilai telah digeser makna dan fungsinya sehingga budaya adiluhung yang sarat dengan makna kultural spiritual itu pun hanya dijadikan sebagai komoditas politik.

"Pisowanan Ageng merupakan pengejawantahan *manunggaling kawula lan gusti* dalam konteks hubungan raja dengan rakyat maupun hubungan raja dengan Tuhan. Nah, yang namanya Pisowanan Ageng ini kini sudah banyak diselewengkan dan lebih terasa nuansa politisnya," ujarnya.

Nanang berharap persoalan genting yang kini dihadapi Yogyakarta yaitu berkait masa depan keistimewaan Yogyakarta, hendaknya menjadi fokus utama perhatian yang harus diperjuangkan supaya terwujud.

Beragam aksi digelar oleh masyarakat sebagai ungkapan kegelisahan hati. Meski tidak satu dalam kesepahaman, masyarakat Yogyakarta membuktikan bahwa perbedaan tidak harus menimbulkan perpecahan. Melalui aksi simbolik, mereka mengekspresikan pemikiran

SELASA WAGE 10 JUNI 2008 (6 JUMADILAKIR 1941)

SRI SULTAN HB X:

Kekerasan, Cermin Tidak Adanya 'Trust'

KR-EKO BOEDIANTORO

Sri Sultan HB X berdialog dengan Forum Rakyat Jogja (FRJ) Senin, (9/6) di PSPK UGM.

YOGYA (KR) - Forum Rakyat Jogja (FRJ), Senin (9/6) menggelar dialog Anti Kekerasan dengan tema 'Tegakkan NKRI dan Pancasila' di halaman Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM. Dialog anti kekerasan ini antara lain menghadirkan Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) Yogyakarta H Abdul Muhaimin dan tokoh FPUB lainnya.

Dalam dialog yang dipandu Kepala PSPK UGM Prof Susetiawan, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan, terjadinya kekerasan merupakan cermin tidak adanya *trust*, fluktuasi semakin meningkat setelah reformasi. Itu akibat dalam meletakkan fondasi pembangunan tanpa etika dan moralitas, karena itu dari Yogya kita bangun moralitas Indonesia.

Dalam dialog tersebut Sri Sultan Hamengku Buwono X menawarkan tiga konsep untuk membenahi dalam membangun bangsa Indonesia ke depan. Konsep yang ditawarkan Sultan di antaranya maritim, kebhinekaan dan budaya. Strategi kebudayaan itu memanusiakan manusia, kemandirian menjadi subjek dalam pembangunan bukan pendekatan ekonomi yang jadi panglima.

Sri Sultan juga sangat prihatin, karena kekerasan justru terjadi setelah reformasi, tak hanya di Monas, tetapi sebelumnya juga terjadi konflik kekerasan di berbagai daerah.

Dialog FRJ tersebut didukung FPUB, Komite Kemanusiaan Yogyakarta (KKY), GKI, GMNI, Gerakan Jogja Bangkit (GJB), PMKRI, AJI Damai, BSM, PMII, PW IPPNU DIY, Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), Aliansi Masyarakat Bantul (Ganjuran, Pundong, Kanutan), PPG Jetis, Turgo Asri, Interfidei, GMKI, Pusham UII, BEM UMY, BEM UIN Suka, RTND, IRE Jogja, Aliansi Warga Nahdlotul Ulama, Forum Silaturahim Pesantren dan Petani (FSPP). **(Asp)-a**

Kedaulatan Rakyat 21 Mei 2008, Rabu

'Tapa Bisu' untuk Kebangkitan Bangsa

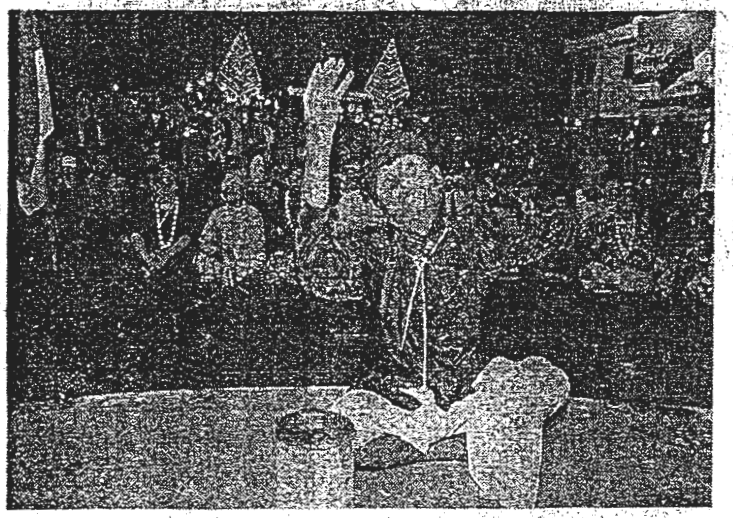

KR-FRANZ BOEDI SUKARNANTO

Tarian spiritual di simpang empat Tugu Yogyakarta.

YOGYA (KR) - Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) dan Komite Kemanusiaan Yogyakarta (KKY) menggelar aksi damai, refleksi dan doa bagi keselamatan bangsa, Senin (19/5) malam, dimulai dari Tempat Parkir Monjali menuju simpang empat Tugu hingga Alun-alun Utara Yogyakarta.

Acara bertajuk 'Lampah Ratri Hamapag Cahya Sejati Hamerti Kuncaraning Nagri' diikuti lebih 2 ribu peserta dari segala lapisan masyarakat dan lintas iman di Yogyakarta, dikemas dalam bentuk ritual Jawa untuk memperingati dan merenungkan makna seabad kebangkitan nasional dan satu dekade reformasi.

Menurut Penanggung jawab Acara RM Y. Suyatno Hadiatmojo, kegiatan ini merupakan bentuk aksi masyarakat sipil sebagai bagian dari gerakan sosial berlandaskan budaya dan spiritualitas. "Kegiatan ini steril dari tujuan politik atau kekuasaan, tetapi semata-mata sebuah pesan moral. Inilah bentuk keprihatinan dan seruan batin kepada Tuhan atas situasi bangsa yang makin terpuruk, jauh dari kehidupan yang adil, damai dan sejahtera. Bangsa ini perlu kembali menegaskan diri sebagai hamba Tuhan yang diutus sebagai rahmat dan wakil-Nya di atas bumi," jelasnya.

Sementara Anggota Panitia Awang Rebo Legi menambahkan, bangsa ini harus kembali kepada Tuhan, bukan mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok. "Bangsa ini pasti akan mampu bangkit kalau dibangun dalam kebhinekaan yang menjunjung tinggi solidaritas kebangsaan," kata Awang.

Kegiatan dimulai pukul 21.30 dengan upacara adat Jawa yang menyimbolkan keberangkatan manusia sebagai utusan Tuhan di muka bumi. Setelah diawali kidung macapat, peserta berjalan kaki dari Monjali menuju simpang empat Tugu. Peserta melakukan perjalanan spiritual hening-bisu yang menyimbolkan bersatunya cipta, rasa dan karsa manusia dengan Sang Pencipta. Dijelaskan Suyatno, tapa bisu dimaksudkan sebagai refleksi diri. "Biarlah hati, rasa dan iman yang berbicara," ujarnya.

Di simpang empat Tugu, peserta mengadakan meditasi, melantunkan kidung macapat, tarian spiritual dan doa bersama *(samadhi)*. Kemudian kirab dilanjutkan menuju Alun-alun Utara, di mana peserta disambut berbagai jenis musik religius dari beberapa agama, sebelum diakhiri renungan dan doa. **(*-4)-f**

KOMPAS SENIN, 25 FEBRUARI 2008

Misa Syukur "Ngrowhod"

Umat Katolik di Desa Girikerto, Turi, menggelar misa syukur bernuansa Jawa yang merupakan salah satu rangkaian upacara adat Ngrowhod di Balai Desa Girikerto, Sabtu (23/2). *Ngrowhod* merupakan akronim bahasa Jawa, *ngeluri ombyaking wargo hanemetri kuncoro desa*, yang berarti budaya kegotongroyongan untuk mengusahakan desa yang tertata baik serta rasa syukur akan karunia Tuhan.

SENIN PON 21 MEI 2007 (4 JUMADILAWAL 1940)

REFLEKSI REFORMASI

Memori Kolektif Masyarakat Pendek

YOGYA (KR) - Memori kolektif masyarakat untuk mengingat sejarah sangat pendek. Sehingga dengan mudah banyak elemen reformasi yang sudah melupakan gaung dari reformasi itu sendiri. Tanpa mau tahu apakah reformasi itu sudah berhasil atau belum. Justru masyarakat terjebak pada pola pikir yang lebih memikirkan kepentingannya sendiri.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Forum Persaudaraan Umar Beriman Yogyakarta (FPUB) KH Abdul Muhaimin saat membuka sarasehan memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang mengambil tema 'Menggali Nilai Eleformasi, Menggelorakan Bangkitnya Spiritualitas dan Budaya untuk Bangsa' di Pagelaran Kraton Yogyakarta, Minggu (20/5). Acara yang digelar secara sederhana tersebut diikuti beberapa elemen masyarakat yang terlibat dalam peristiwa 9 tahun silam yaitu Pisowanan Agung dalam rangka reformasi di Kraton Yogyakarta

Menurut KH Abdul Muhaimin lewat sarasehan ini juga untuk mempertanyakan kembali apakah reformasi masih ada apinya terutama di tingkat elit. Ia berharap ketidakhadiran elemen lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun elemen yang terlibat dalam gerakan reformasi bukan karena lupa dengan sejarah

Salah satu pendiri FPUB yang juga terlibat langsung dalam gerakan reformasi di Yogyakarta Rm Suyatno Hadiatmaja Pr mencoba menceritakan kembali bagaimana proses gerakan reformasi di Yogyakarta Awal tahun 1998 pihak FPUB sendiri sudah merasakan akan semangat berbagai elemen masyarakat Yogyakarta untuk menyikapi peristiwa di Indonesia. Bentrokan dan aksi unjuk rasa sudah menjadi keseharian di Yogyakarta Bahkan beberapa tokoh FPUB waktu itu 'hampir' menginap di sel aparat terkait kegiatan yang dilakukan.

"Saya masih ingat saat itu membuat 368 spanduk berisi kata-kata perdamaian dan selebaran yang ditandatangani Sultan HB X untuk dibagikan ke masyarakat," kata Suyatno. Selanjutnya pihaknya berkoordinasi dengan lebih dari 90 kampus di Yogyakarta untuk melakukan gerakan mendorong terjadinya reformasi. Hingga puncaknya terjadi pada 20 Mei 1998 saat ratusan ribu masyarakat Yogyakarta datang ke Kraton Yogyakarta untuk mendengarkan deklarasi reformasi untuk kedamaian dan kesejahteraan Bangsa Indonesia yang dilakukan Sultan HB X, Paku Alam VIII dan segenap elemen gerakan reformasi.

Menurut Suyatno dalam berbagai peristiwa memang tidak bisa saling menyalahkan terutama dengan adanya bentrok antara masyarakat dan aparat. (R-1)-f

Bedah Buku
Berpeluh Berselaras; Buddhis-Muslim Meniti Harmoni

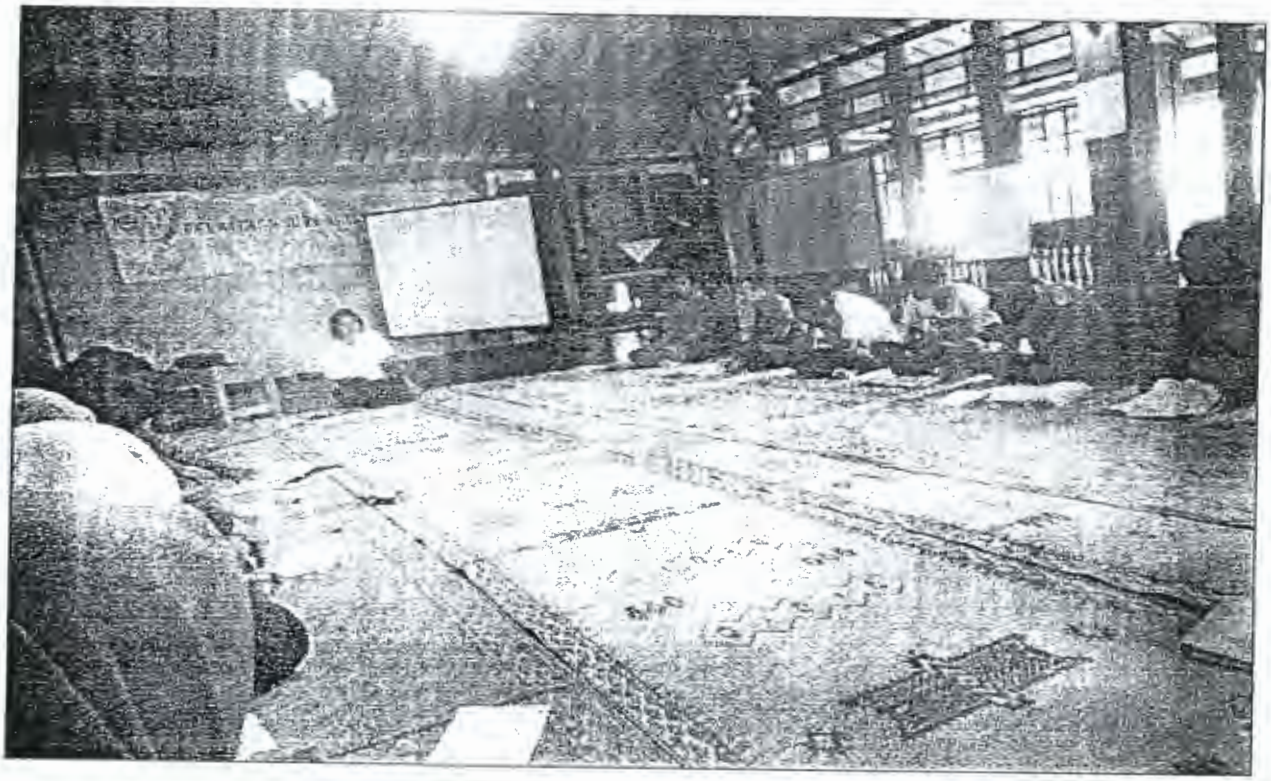

Malam Do'a Bersama
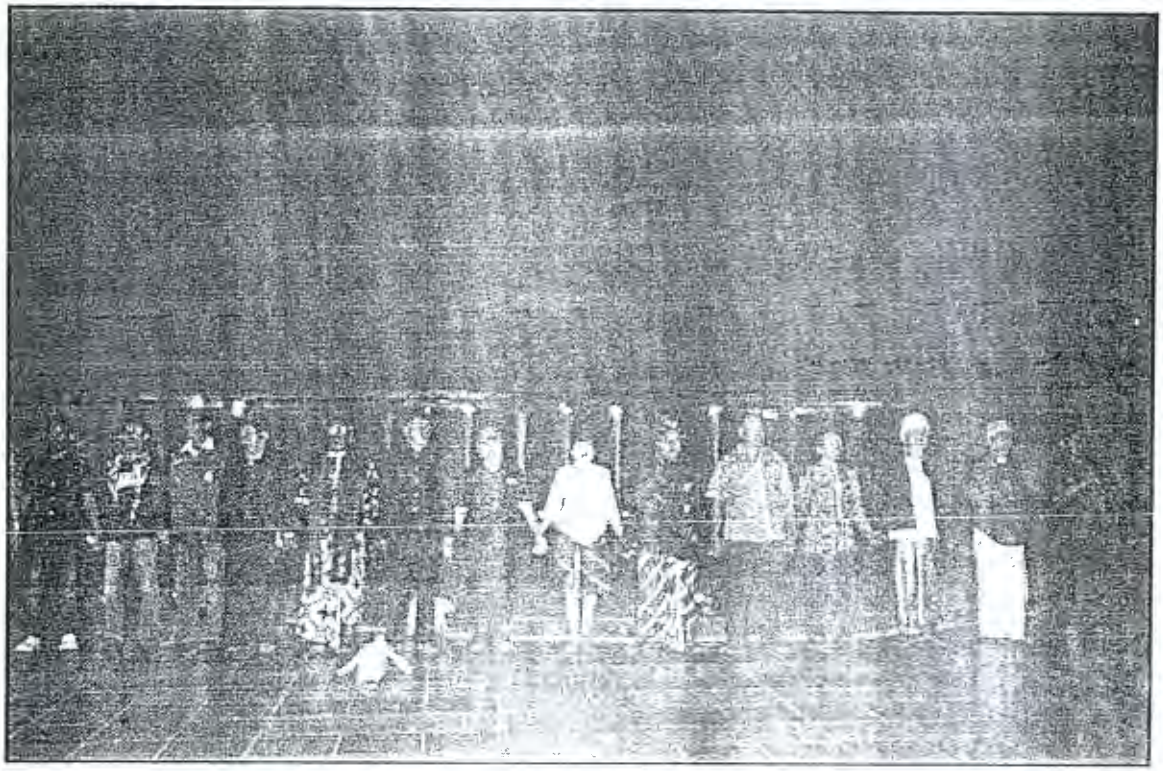
STASIUN
TUGU